

**ANALISIS STRATEGI BERTAHAN DAN ADAPTASI  
FRONT PEMBELA ISLAM PASCA PEMBUBARAN: STUDI  
KASUS FRONT PEMBELA ISLAM DI KECAMATAN KROYA  
TAHUN 2023**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh**

**Faradina Rahmawati Annisa Ananta  
NIM. 2017502042**

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Faradina Rahmawati Annisa Ananta  
NIM : 2017502042  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis Strategi Bertahan dan Adaptasi Front Pembela Islam Pasca Pembubaran: Studi Kasus Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Tahun 2023**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2024



Faradina Rahmawati  
NIM. 2017502042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Strategi Bertahan dan Adaptasi Front Pembela Islam Pasca  
Pembubaran: Studi Kasus Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Tahun  
2023**

Yang disusun oleh Faradina Rahmawati Annisa Ananta (NIM 2017502042)  
Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora,  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 18 April  
2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana  
Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

**Muta Ali Arauf, M.A**  
NIP. 198908192019031014

Penguji II

**Kurnia Sari Wiwaha, M.Ag**  
NIP. 199407212020122018

Ketua Sidang/Pembimbing

**Ubaidillah, M.A**  
NIP/NIDN. 02121018201

Purwokerto, 22 April 2024

Dekan

  
**Dr. Hartono, M.Si.**  
NIP. 197205012005011004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr.Faradina R

Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan FUAH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Faradina Rahmawati Annisa Ananta

NIM : 2017502042

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan : Studi Agama-Agama

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Analisis Strategi Bertahan dan Adaptasi Front Pembela Islam Pasca Pembubaran: Studi Kasus Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Agama (S.Ag.) Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Ubaidillah, M.A  
NIP. 02121018201

## MOTTO

Siapapun yang tidak mau berubah, ia tidak akan berkembang.

*-George Bernard Shaw*



# **Analisis Strategi Bertahan dan Adaptasi Front Pembela Islam Pasca Pembubaran: Studi Kasus Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Tahun 2023**

**Faradina Rahmawati**  
NIM. 2017502042  
[rfaradinaa@gmail.com](mailto:rfaradinaa@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi kasus mengenai bentuk adaptasi dan strategi Front Pembela Islam pasca pembubaran oleh pemerintah pada akhir 2020. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori gerakan sosial konsep *repertoire* Charles Tilly digunakan sebagai kerangka penelitian. Temuan menunjukkan bahwa FPI pasca pembubaran mengadopsi beberapa bentuk adaptasi, seperti silaturahmi dengan stakeholder dan kegiatan merangkul masyarakat. Strategi yang dijalankan meliputi perubahan nama, penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan mengurangi tindakan *sweeping*, pendirian Lembaga Pendidikan non-formal serta strategi pendanaan. FPI berhasil bertahan dan berkembang dengan menjawab dinamika dan memenuhi konsep gerakan sosial Tilly. Dari temuan penelitian tersebut, kegiatan yang dilakukan pasca pembubaran oleh FPI di Kecamatan Kroya tidak ditemukan kegiatan yang mengarah pada tindakan membahayakan dan bertentangan dengan aturan yang ada.

**Kata Kunci:** *Gerakan sosial, Front Pembela Islam, Front Persaudaraan Islam, Pembubaran*

**Analysis of Survival Strategy and Adaptation of the Islamic Defenders Front  
Post-Dissolution: Case Study of the Islamic Defenders Front in Kroya  
District in 2023**

**Faradina Rahmawati**

**NIM. 2017502042**

**[rfaradinaa@gmail.com](mailto:rfaradinaa@gmail.com)**

**Abstract**

This research uses qualitative methodology with a case study on the adaption forms and strategies of the Islamic Defenders Front (FPI) following its dissolution by the government in late 2020. Data were collected through interviews, observations, and document analyses, subsequently analyzed via data reduction, display data, and conclusion drawing. The social movement theory of repertoire by Charles Tilly serves as the research framework. Findings indicate that post-dissolution, FPI has adopted several adaptation forms, such as fostering relationships with stakeholders and engaging in community outreach activities. Implemented strategies include name changes, enforcing *amar ma'ruf nahi munkar* by reducing sweeping actions, establishing non-formal educational institutions, and fundraising. FPI has managed to sustain and grow by responding to dynamics and adhering to Tilly's social movement concept. Following the research findings, activities conducted by FPI in Kroya District post-dissolution do not appear to involve actions endangering or contradicting existing regulations.

**Keywords:** *Social movement, Islamic Defenders Front, Islamic Brotherhood Front, Dissolution.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perubahan Front Pembela Islam Pasca Pembubaran: Studi Kasus Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Tahun 2023”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’at Beliau di hari akhir nanti. Aamiin.

Keterbatasan peneliti dalam berbagai aspek mendorong peneliti untuk melibatkan berbagai pihak dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan rendah hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai harapan.

Dengan rasa hormat dan cinta kasih penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN SAIZU Purwokerto
2. Bapak Dr. Hartono, M.Si. selaku Dekan FUAH UIN SAIZU Purwokerto sekaligus pembimbing akademik peneliti.
3. Bapak Ubaidillah, M.A selaku koordinator prodi Studi Agama-Agama sekaligus pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta insight baru dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan wawasan yang baru kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN SAIZU Purwokerto.
5. Keluargaku tercinta, Ibu, Babeh, kakakku Vriska, adikku Raras yang telah memberikan banyak dukungan dan do’a sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sangat baik.
6. Bapak K.H. Kholidin, Bapak H.Solihun, Bapak Tugiyono, Mbak Dian Maftuhah, serta pengurus dan anggota Front Persaudaraan Islam Kecamatan



Kroya yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis.

7. Adikku Nafilla Trivisa Adzilya, yang telah menemani penulis untuk penelitian, mengambil data, dan wawancara kepada narasumber.
8. Indra Zacky Pratama, 911 penulis. Terima kasih telah menemani setiap progres, mendengarkan keluh kesah serta menerima up to down mood penulis.
9. Sahabatku, Lisa, Rachma, Ami, dan Caca yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan share kebingungan serta selalu memacu ambis and grow together.
10. Seluruh teman-teman SAA-MBAT 2020 yang telah menemani dan mengisi cerita serta kenangan selama penulis menempuh pendidikan.
11. Member NCT Dream khususnya Lee Haechan dan Mark Lee yang membantu penulis survive dari rasa burnout dan penat selama penyusunan skripsi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II ADAPTASI FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) PASCA PEMBUBARAN di KECAMATAN KROYA</b> .....	<b>20</b>
A. Front Pembela Islam .....	20
B. Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya .....	25
C. Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Pasca Pembubaran (Front Persaudaraan Islam).....	28
D. Adaptasi Front Pembela Islam Pasca Pembubaran di Kecamatan Kroya .....	32

<b>BAB III STRATEGI DAN TAKTIK FRONT PERSAUDARAAN ISLAM KECAMATAN KROYA PASCA PEMBUBARAN .....</b>	<b>37</b>
A. Definisi Strategi .....	37
B. Strategi yang dilakukan Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Pasca Pembubaran.....	38
C. FPI Sebelum dan Pasca di Bubarkan .....	42
<b>BAB IV MENAKAR KEMAMPUAN ADAPTASI FPI .....</b>	<b>47</b>
A. Adaptasi FPI Pasca Pembubaran sebagai Bentuk Gerakan Sosial .....	47
B. Strategi FPI Pasca Pembubaran .....	50
C. FPI Kecamatan Kroya Pasca Pembubaran dalam Pandangan Masyarakat.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Rekomendasi.....	55
C. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Front Persaudaraan Islam.....	30
Gambar 3.1 Muktamar HTI di GBKI.....	54
Gambar 4.1 Pamflet/Brosur kegiatan Milad FPI.....	58
Gambar 4.2 Acara Milad FPI ke-3 .....	59



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan seiring dengan berjalannya waktu menjadi sebuah fenomena yang semakin kompleks dan terjadi dalam kurun waktu yang cepat serta menjadi suatu dinamika yang akan terus berkembang di kemudian hari. Transformasi ini mencakup dari beragam bidang, seperti pada bidang sosial, budaya, serta ekonomi. Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi ini menyebabkan Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan dalam pola pikir dan perilaku masyarakatnya. Perubahan ini memunculkan tantangan baru dan menciptakan kebutuhan untuk memahami serta beradaptasi terhadap perubahan yang ada.

Istilah perubahan tertera pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki dasar dari kata 'berubah' bermakna menjadi lain atau berbeda dari awalnya. Kemudian perubahan juga di definisikan sebagai inti dari proses perkembangan yang dialami oleh seseorang (Hidayat, 2012). Perubahan adalah karakteristik fundamental atau sifat dasar dari masyarakat yang mana mengubah konsep dari "kehidupan sosial" menjadi sesuatu yang mirip dengan keberlangsungan hidup sosial itu sendiri. Kehidupan sosial mencakup perubahan yang tidak pernah berhenti (Santoso, 2011). Perubahan juga diartikan sebagai proses peralihan dari statis atau sesuatu yang tetap menjadi sesuatu yang dinamis yang berarti bisa beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi yang ada dengan meliputi keseimbangan sosial baik individu maupun organisasi supaya dapat mengimplementasikan ide dan konsep terbaru untuk mencapai tujuan (Irwan, 2017).

Dalam konteks negara dan bangsa Indonesia terciptanya dinamika perubahan disebabkan karena terdapat beberapa faktor, salah satunya yaitu dari aspek keberagaman yang ada. Kondisi dan realita yang ada di Indonesia sendiri yang mana Indonesia adalah negara yang majemuk dengan banyaknya keragaman serta perbedaan yang mana diantaranya yaitu bisa dilihat dari

keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya 17.000 pulau serta ratusan suku bangsa yang terdapat di Indonesia (Khoeron, 2022). Keberagaman ini juga tercermin dari masyarakat Indonesia yang beragam dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing ada yang memeluk agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, serta Konghucu dan masih banyak juga yang lainnya.

Dilihat dari realita sosial terkait keberagaman agama di Indonesia, yang mana apabila dilihat dengan berdasarkan data, agama Islam masih menjadi agama mayoritas dengan presentase sebanyak 86,93% masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam (Pusat Data ekonomi dan Bisnis Indonesia (2022). Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa agama Islam memiliki penganut terbanyak di Indonesia namun, fakta tersebut tidak menutup bahwasanya terdapat agama-agama lain yang juga memiliki banyak umat. Hal ini menunjukkan betapa beragamnya kepercayaan dan keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia.

Sejalannya waktu dengan enam agama yang diakui dalam Undang-Undang serta banyaknya kepercayaan dan agama-agama lokal yang tersebar diseluruh penjuru negeri, sehingga hal ini membuat adanya perubahan dalam dinamika keagamaan di Indonesia serta adanya pergeseran dalam intensitas keberagaman agama di berbagai lapisan masyarakat. Disamping itu, negara Indonesia yang juga merupakan negara dengan menjalankan sistem demokrasi sehingga hal tersebut memiliki arti bahwasannya negara Indonesia memberikan kesempatan serta membuka ruang untuk seluruh warga negara guna berkumpul dan membentuk suatu organisasi atau gerakan (Annisa Nurdiassa, 2019). Oleh karena itu, dengan adanya keragaman agama di Indonesia serta sistem demokrasi tersebut, menyebabkan munculnya berbagai gerakan atau organisasi dengan berbasis keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia terlebih, pada era reformasi tahun 1998.

Mulai munculnya gerakan-gerakan baik sosial politik maupun sosial keagamaan pada era reformasi yang pada saat itu ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Soeharto dikarenakan setelah 32 tahun lamanya berada di

bawah rezim pemerintahan orde baru, hingga pada 1998 masyarakat Indonesia akhirnya dapat mengalami fase atau era dimana terdapat keterbukaan serta kebebasan dalam berbagai aspek (Sepri Yunarman, 2022). Hal tersebut sebagaimana yang tertera pada Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar yang mana berbunyi bahwasannya negara menjamin tiap-tiap warga negara mendapatkan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat di ruang publik. Sehingga dari hal tersebut masyarakat mulai membentuk gerakan sosial atau organisasi masyarakat sebagai tempat berkumpul untuk berbagai kepentingan. Berdasarkan data yang ada di Kemendagri terdapat 344.039 organisasi masyarakat yang ada di Indonesia pada tahun 2017 (Indonesia H. S., 2017).

Berbagai gerakan atau organisasi masyarakat yang muncul dan turut mengisi kebebasan pada era reformasi yaitu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, dan Front Pembela Islam (FPI). Semua gerakan atau organisasi yang ada mempunyai gaya dan corak yang berbeda-beda seperti pada gerakan Hizbut Tahrir yang mana memiliki ideologi politik berusaha agar menyatukan negara-negara Islam pada satu naungan yang besar yaitu “Khilafah” (Shobron, 2016). Apabila kita lihat lagi ke belakang, Hizbut Tahrir Indonesia juga salah satu cabang dari Hizbut Tahrir Internasional atau global dan dari segi sejarah atau historis munculnya organisasi Hizbut Tahrir ini berangkat karena kondisi umat Islam yang pada saat itu mengalami keterpurukan di berbagai wilayah dunia dampak dari penjajahan Barat. Sementara apabila dilihat dari segi normatife, berdirinya Hizbut Tahrir merupakan sebuah usaha serta inisiatif dari para pendirinya dengan tujuan untuk mematuhi perintah Allah SWT dalam berdakwah (Rafifuddin, 2015).

Organisasi lainnya yang muncul pada era reformasi yaitu Majelis Mujahidin Indonesia. Organisasi tersebut berangkat dari diadakannya Kongres Mujahidin I yang diadakan pada tahun 2000 tepatnya di Yogyakarta yang mana diadakannya kongres tersebut, berangkat dari adanya realita sosial dimana umat Islam dalam keadaan terpuruk. Sehingga dari dilaksanakannya Kongres

tersebut menghasilkan dilahirkannya organisasi yang bertujuan sebagai himpunan bagi umat Islam guna menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan nama Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI (Sulaiman, 2014). Dari beberapa organisasi yang muncul dan mengisi ruang kebebasan yang ada baik saat era reformasi ataupun pasca reformasi, masih ada satu organisasi yang pada saat itu cukup menjadi sorotan dari masyarakat Indonesia yaitu organisasi Front Pembela Islam.

Berbicara mengenai Front Pembela Islam di Indonesia, gerakan tersebut secara sah didirikan pada 17 Agustus 1998 di Jakarta. Organisasi Front Pembela Islam ini memiliki landasan atau prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* serta dalam gerakannya, Front Pembela Islam (FPI) berdiri dengan berlandaskan Islam yang dicantumkan pada visi-misi yang ada pada gerakannya sebagaimana yaitu menerapkan nilai-nilai Islam atau syariat Islam dengan menyeluruh atau secara *kaffah* dan diimplementasikan dengan berbagai jalan misalnya dengan dilaksanakannya dakwah, dan jihad. Dengan berdirinya organisasi Front Pembela Islam (FPI) adalah bentuk tanggapan atau respon dari para ulama yang prihatin dengan berbagai kondisi yang pada saat itu terjadi pada umat Islam di tengah masyarakat terlebih dalam bidang moral dan akhlak yang dinilai rusak atau jauh dari syariat Islam. Tanda-tanda rusaknya akhlak pada masa itu bisa dilihat dari melonjaknya kasus kemaksiatan seperti maraknya prostitusi, perampokan dimana-mana, penyalahgunaan narkoba, dan hal-hal kriminal lainnya yang bertentangan dengan hukum syariah. Hal tersebut berangkat dari keresahan yang ada pada kondisi real bahwa para penegak hukum tidak mampu menyelesaikan masalah sosial tersebut dengan tuntas dan baik oleh karena itu, dengan adanya kegelisahan serta gagasan ulama dan Habib yang tergabung dalam organisasi FPI menjadi hal yang penting dan diperlukan (Pratama, 2019).

Organisasi Front Pembela Islam (FPI) dalam gerakannya untuk memerangi adanya kemungkaran dan maraknya kemaksiatan yang ada, sehingga Front Pembela Islam memiliki “polisi” dengan nama Laskar Pembela Islam yang memiliki fungsi guna melaksanakan tujuan utama dari Front Pembela Islam



seperti yang telah dijelaskan tadi sebagaimana menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut Front Pembela Islam (FPI) prinsip *amar maruf nahi munkar* saling berkaitan, menjadi satu kesatuan yang mana keduanya jika dipisahkan maka nantinya tidak akan tercapainya masyarakat yang religius yang menerapkan syariat Islam secara kaffah (Jajang Jahroni, 2004). *Action* atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan utama Laskar Pembela Islam adalah melakukan *sweeping* atau penertiban. Pelaksanaan *sweeping* oleh Laskar Pembela Islam biasanya dilakukan ketika adanya kegiatan maksiat seperti adanya perjudian, prostitusi, tempat-tempat karaoke, diskotik, dan bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya (Syahrul Efendi, 2006). Meskipun demikian dalam realitanya kerap kali Laskar Pembela Islam dari FPI ini menuai kritikan dari beberapa masyarakat serta sejumlah tokoh karena dalam melakukan penertiban atau *sweeping*, Laskar Pembela Islam tak jarang melakukannya dengan kekerasan dan hal tersebut membuat masyarakat merasa terganggu (Hakim, 2014). Selain itu, tindakan *sweeping* juga mendapat kecaman dari salah satu tokoh yaitu KH Hasyim Muzadi selaku Ketua Umum PBNU pada saat itu mengatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan *sweeping* yang disertai adanya unsur kekerasan oleh Laskar Pembela Islam, oleh karena tindakan tersebut malah berdampak pada nama baik atau citra umat Islam yang buruk (Hakim, 2014). Selain tindakan *sweepingnya* yang menuai kritikan, Front Pembela Islam pada tahun 2002 ketika dilaksanakannya tabligh akbar hari milad FPI meminta agar hukum atau syariat Islam masuk pada pasal 29 UUD 1945 yang pada pasal tersebut berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kemudian meminta ditambahkan dengan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal tersebut berlangsung pada rapat MPR mengenai amandemen UUD 1945 dengan membawa poster dengan tulisan “Syariat Islam atau Disintegrasi Bangsa” (Huda, 2020). Serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan Front Pembela Islam itu menjadikan hal tersebut menjadi citra dan wajah Front Pembela Islam yang ada di persepsi masyarakat dan media massa.

Seiring dengan berjalannya waktu, Front Pembela Islam (FPI) telah menghadapi berbagai perubahan yang terjadi ketika adanya problem yang muncul di dalam masyarakat. Perubahan tersebut terutama terkait dengan konsep dan gerakan FPI yang diamati dalam konteks negara hukum. Sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai stigma serta pandangan dari masyarakat yang mana pandangan-pandangan tersebut ada yang positif dan ada juga sebaliknya. Pandangan positif dari masyarakat karena Front Pembela Islam (FPI) turut berkontribusi terhadap isu-isu kemanusiaan seperti ketika ada bencana ataupun musibah, sedangkan pandangan negatif masyarakat karena tak jarang dalam eksekusi *sweeping* yang dilakukan terdapat unsur kekerasan (Rosadi, 2008).

Dengan adanya aksi atau tindakan *sweeping* yang dilakukan dengan disertai kekerasan hal ini menyebabkan konflik dengan masyarakat, selain itu juga adanya anggapan bahwa *sweeping* tidak memiliki izin dari pihak kepolisian. Sehingga dari hal tersebut, Front Pembela Islam (FPI) dianggap sudah melampaui batas wewenang dari sebuah gerakan atau ormas yang sebagaimana mestinya hal tersebut menjadi wewenang dan fungsi dari Kepolisian sebagai aparat penegak hukum hal ini tertera dalam UU No.2 Tahun 2002. Selain itu, organisasi Front Pembela Islam juga telah melewati batas terhadap UU No.17 Tahun 2013 yang mana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa “organisasi masyarakat dilarang untuk melakukan sebuah tindakan dengan kekerasan, mengganggu ketentraman serta ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial”(Pusat, 2013). Pada saat itu bisa dikatakan FPI mempunyai *track record* dan citra yang buruk di masyarakat seperti insiden di Monas dan adanya serangan terhadap kelompok Ahmadiyah yang pada saat itu FPI secara aktif menekan pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah, hingga mengancam revolusi apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. FPI juga merusak kantor Kemendagri dalam aksi protes mereka terhadap kebijakan anti-miras di beberapa daerah. Selain itu, FPI menentang keras rencana adanya konser Lady Gaga yang pada tahun 2012 akan diselenggarakan di Jakarta (Syaefudin, 2014).

Adanya realita seperti itu serta adanya peraturan Undang-Undang sehingga pemerintah memiliki wewenang untuk memberi sanksi tegas atas hal-hal yang menyalahi aturan atau Undang-Undang. Pencabutan legalisasi dalam konteks organisasi masyarakat adalah bentuk hukuman terberat, dan hal ini memiliki arti bahwasannya gerakan ataupun ormas yang dianggap berlawanan baik itu dengan Pancasila maupun UU boleh dibubarkan oleh pemerintah (Lediya, 2022). Sehingga, pada 30 Desember 2020 dengan melalui adanya Surat Keputusan Bersama Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh 6 Menteri serta Kepala Lembaga, organisasi Front Pembela Islam secara resmi dibubarkan serta diberhentikan segala bentuk aktivitas dan kegiatannya. Selain itu, Front Pembela Islam juga tidak boleh lagi memakai simbol dan atribut organisasi (Lediya, 2022).

Selang waktu setelah resmi dibubarkannya organisasi Front Pembela Islam di Desember 2020, kemudian tidak memerlukan waktu lama Front Pembela Islam di berbagai daerah mendeklarasikan bahwa akan berganti nama menjadi **Front Persaudaraan Islam** (Bagaskara, 2021). Kemudian organisasi Front Persaudaraan Islam ini pada pertengahan Agustus meluncurkan logo baru serta mendeklarasikan asas organisasi dalam Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam (Reza Deni, 2021). Dari berbagai daerah di penjuru negeri yang mendeklarasikan perubahan nama, hal tersebut juga dilakukan di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Kecamatan Kroya adalah bagian dari wilayah pada Kabupaten Cilacap. Sejak awal berdirinya Front Pembela Islam sebelum bertransformasi, di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap organisasi ini sudah cukup eksis ditengah masyarakat. Dengan mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah pada 2020 saat itu, Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya resmi dibubarkan. Kemudian ketika pusat mendeklarasikan bahwa mengubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam, hal tersebut juga diikuti di Kecamatan Kroya yang

saat ini masih ada dan eksis menjadi Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Berangkat berdasarkan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Strategi Bertahan dan Adaptasi Front Pembela Islam Pasca Pembubaran: Studi Kasus Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Tahun 2023**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka timbul rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di Kecamatan Kroya pasca pembubaran?
2. Bagaimana strategi dan taktik yang digunakan oleh Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya untuk beradaptasi pasca pembubaran?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan mengacu pada pernyataan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan guna mendalami serta menganalisis secara mendalam mengenai;

- a. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya pasca adanya pembubaran.
- b. Strategi yang dilakukan dalam beradaptasi pasca pembubaran oleh Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap adaptasi dan strategi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya pasca pembubaran. Temuan penelitian ini dapat membantu memperkaya kerangka teoritis terkait

dengan perubahan organisasional, khususnya dalam konteks organisasi keagamaan di Indonesia. Disamping hal itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan yang berharga bagi penelitian lebih lanjut mengenai dampak perubahan sosial terhadap organisasi keagamaan dan dinamika adaptasi yang terkait.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Front Persaudaraan Islam

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Front Persaudaraan Islam dalam memahami sejauh mana organisasinya dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan atau dinamika lingkungan yang signifikan.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah literatur dan pengetahuan terkait perubahan dan strategi dalam sebuah gerakan.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini guna untuk mengkaji serta mengeksplorasi terkait adaptasi gerakan FPI, peneliti melakukan telaah pustaka sehingga pada telaah pustaka ini memberikan gambaran dan pandangan yang relevan dengan topik yang diteliti serta memberikan pemahaman terkait adanya persamaan dan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Oleh karena hal tersebut, terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini diantaranya yaitu:

No.	Nama	Judul	Diterbitkan	Temuan Penelitian
1.	Sepri Yunarman, Nurul Fadhilah, Ali Akbarjono	Gerakan Sosial Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Pembubaran	Jurnal Sosiologi Nusantara (Vol 8, No 1, 2022)	Pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana eksistensi gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah dan juga

				mengkaji bagaimana proses pembangunan gerakan sosial dan strategi yang digunakan dalam organisasi HTI khususnya di Provinsi Bengkulu (Sepri Yunarman, 2022).
2.	Dr. Ali Maksum, Ali Mashuri	Transformasi Gerakan Islam Pasca Pelarangan Oleh Pemerintah Indonesia.	Universitas Brawijaya, 2021.	Penelitian ini membahas bagaimana para anggota dari mantan Front Pembela Islam menerapkan ideologi mereka setelah organisasi tersebut dibubarkan oleh pemerintah dan juga membahas bagaimana keterlibatan antara adanya pembubaran FPI terhadap gerakan islam di Indonesia (Dr.Ali Maksum, 2021).
3.	Rohit Mahatir Manese	Gerakan Islam Pasca Orde Baru: Kelahiran FPI dan Dampaknya	Historia Islamica Journal of Islamic History And Civilization	Dalam tulisannya, Rohit mengkaji mengenai bagaimana awal mula berdirinya gerakan Front Pembela Islam di Indonesia, kemudian bagaimana Front Pembela Islam turut mewarnai

				<p>ruang kebebasan pada masa reformasi Indonesia, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya gerakan Front Pembela Islam di Indonesia serta tindakan apa saja yang Front Pembela Islam lakukan di Indonesia (Manese, 2023).</p>
4.	Abdul Qohar, Kiki Muhammad Hakiki	Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI sebelum dan sesudah Pembubaran	KALAM (Journal Faculty of Ushuluddin and Religious Study Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	<p>Dalam penelitian ini mengkaji terkait sistem atau jaringan kerja dari Hizbut Tahrir Indonesia di Lampung dalam upaya rekrutmen kader atau anggota untuk mempertahankan identitasnya. Selain itu penelitian ini juga menelaah eksistensi organisasi HTI pasca pembubaran pada era rezim pemerintahan Joko Widodo (Abdul Qohar, 2017).</p>
5.	Siska Okma Lediya	Pembubaran Organisasi Masyarakat	Universitas Islam Negeri Raden Intan	<p>Dalam penelitian tersebut, menelaah bagaimana pembubaran</p>

		Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	Lampung	organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah dan juga mengkaji bagaimana prosedur pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (Lediya, 2022).
6.	Hakam Abdillah Jabbar	Upaya Resiliensi dalam Gerakan NKRI Bersyariah Pasca Pembubaran FPI	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Pada tulisannya, Hakam menganalisis terkait bagaimana resiliensi dari Front Pembela Islam (FPI) pasca pembubaran dalam mengawal gerakan NKRI Bersyariah (Jabbar, 2022).

Dengan merujuk penelitian-penelitian terdahulu atau kajian pustaka tersebut, ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait dengan FPI, dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh FPI pasca dibubarkannya gerakan tersebut. Kemudian pada penelitian-penelitian terdahulu belum ada atau belum ditemukannya penelitian yang membahas mengenai strategi yang dilakukan FPI pasca pembubaran. Disamping itu, adanya pembubaran FPI ini bisa dikatakan belum lama terjadi sehingga fenomena ini menjadi sebuah fenomena yang masih baru. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.



## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alat atau media yang menghubungkan peneliti dengan landasan konstruksi teoritis, memberikan pedoman, pegangan, dan tolak ukur. Dalam sebuah penelitian, kerangka teori memiliki peran sangat penting dan urgent, karena teori membantu merumuskan inti permasalahan dan mengklarifikasi cakupan penelitian. Selain itu, kerangka teori juga berfungsi untuk menyusun kembali pembahasan masalah, mempersempit fokus penelitian, dan mengidentifikasi arah yang akan diambil dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial. Definisi gerakan sosial dalam Kamus Sosiologi yaitu sebuah bentuk *action* atau aksi bersama dengan tujuan guna melakukan reorganisasi sosial baik secara formal maupun informal. Dalam pandangan mereka yang mendukung atau terlibat dalam gerakan sosial, gerakan tersebut dianggap sebagai inisiatif yang positif. Definisi lain terkait gerakan sosial yaitu merujuk pada upaya terorganisir oleh sejumlah orang untuk mempengaruhi atau mengubah aspek tertentu dalam masyarakat yang lebih luas, baik itu untuk mempertahankan atau merubah sesuatu yang dianggap penting. Definisi mengenai gerakan sosial juga dikemukakan oleh Touch, sebagaimana diuraikan dalam karya Kuppuswamy menjelaskan bahwa gerakan sosial merujuk pada upaya sekelompok individu yang bekerja bersama-sama dengan tujuan kolektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat (Kuppuswamy, 1979). Masih terkait dengan definisi dari gerakan sosial, pendapat yang senada disampaikan oleh Giddens dalam (Suharko, 2006) yang memaknai gerakan sosial adalah usaha untuk mengejar kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*).

Definisi gerakan sosial dikemukakan berbeda oleh Charles Tilly dimana gerakan sosial dimaknai sebagai serangkaian tindakan perlawanan yang berkelanjutan atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai macam bentuk protes publik untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut memiliki rasa solidaritas dan memiliki komitmen

serta mewakili jumlah yang signifikan (Syawaludin, 2014). Menurut Tilly, gerakan sosial merupakan sesuatu yang *organised* (terorganisir), *sustained* atau berkelanjutan, *self-conscious challenge* atau menantang diri sendiri, serta memiliki kesamaan identitas di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pada intinya gerakan sosial dalam pandangan Tilly ditekankan sebagai “rangkaian interaksi yang berkelanjutan” antara pihak yang berkuasa atau otoritas dan pihak yang menentangnya, yang mengajukan tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi tertentu. Tilly membuat gagasan “serangkaian tindakan perlawanan kolektif” yang Tilly menyebutnya dengan *repertoire* (Syawaludin, 2014).

Teori gerakan sosial *repertoire* ini dikenalkan dan dikembangkan oleh Tilly pada tahun 1970, 1978, dan 1995 yang mana di definisikan oleh Tilly sebagai kumpulan metode atau cara yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan atau klaim mereka. Metode atau cara ini berfungsi sebagai pilihan strategi dan taktik untuk aksi kolektif (Syawaludin, 2014). Disamping itu, kondisi hubungan pertentangan atau hubungan pertentangan merupakan komponen dari gerakan sosial menurut Tilly. Dalam konsep *repertoire* ini menegaskan bahwa tindakan kolektif adalah tindakan yang dilakukan sekelompok orang dari masyarakat secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai gerakan sosial yang melakukan *repertoire* sebagai berikut:

1. Gerakan sosial merupakan gerakan yang terorganisir
2. Gerakan sosial mempunyai tujuan membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi
3. Gerakan sosial melakukan tindakan yang terorganisasi
4. Adanya tindakan menentang dari gerakan sosial secara berkelanjutan
5. Klaim terbuka yang dilakukan gerakan sosial
6. Gerakan sosial melakukan aksi perlawanan secara terus menerus dan berulang
7. Gerakan sosial merupakan gerakan yang memelihara politik perlawanan, tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung

8. Berkembang dan bertahan karena mampu memanfaatkan peluang politik yang ada
9. Gerakan sosial memiliki solidaritas dan identitas gerakan.

Berdasarkan penjabaran mengenai gerakan sosial diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori gerakan sosial Charles Tilly guna mengkaji fokus penelitian peneliti di lapangan yaitu: “Analisis Survival Strategy dan Adaptasi Front Pembela Islam Pasca Pembubaran: Studi Kasus Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Tahun 2022”. Adanya fenomena yang dilakukan oleh Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya pasca pembubaran dalam memperbaiki citra gerakan serta beberapa bentuk adaptasi dan strategi dalam mempertahankan gerakannya menjadi sebuah bentuk rangkaian dari adanya tindakan kolektif agar tercapainya suatu tujuan bersama. Munculnya fenomena dan kondisi ini terjadi sebab keluarnya Surat Keputusan Bersama dari pemerintah sehingga realita tersebut merupakan tindakan yang sejalan dalam konsep *repertoire*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dari adanya beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model rumusan masalah atau pertanyaan pada penelitian ini cenderung mengarah kepada penyingkapan bentuk strategi serta langkah-langkah yang digunakan dalam organisasi Front Persaudaraan Islam. Sehingga karena hal tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Disamping itu, metode penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar bukan angka (Moleong, 2009). Kemudian penelitian kualitatif menurut John W.Creswell yang termuat dalam buku *Research Design* ialah;

“Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis cara yang bertujuan guna mendeskripsikan, mengeksplorasi, serta memahami makna

yang mana oleh beberapa individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari fenomena atau masalah baik sosial ataupun kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif terdiri dari langkah-langkah penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data” (John, 2013).

Jenis penelitian yang akan dilakukan yakni berupa penelitian lapangan. Pemilihan jenis penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam hasil penelitian dengan mengkaji menyeluruh terkait latar belakang subjek penelitian dari kondisi di lapangan sampai saat ini. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan interpretasi dan menjelaskan data temuan yang didapat peneliti melalui beberapa metode yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan detail mengenai fenomena yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat di mana observasi dan pengumpulan data dilakukan untuk mendukung hipotesis penelitian serta mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun dalam penelitian lokasi yang menjadi objek penelitian penulis yaitu pada Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data sebagaimana berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber data primer peneliti dapatkan secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dari Front Persaudaraan Islam Kecamatan Kroya dan beberapa Masyarakat Kecamatan Kroya.

### b. Sumber Sekunder

Sumber penelitian ini juga diambil dari berbagai sumber informasi seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang

dianggap relevan dengan topik penelitian dan mendukung tercapainya tujuan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai referensi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode guna untuk mendapatkan data menyeluruh dan rinci, dengan sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung serta pencatatan sistematis terhadap fenomena yang sedang diamati. Teknik observasi memungkinkan pengamat untuk merekam dan menganalisis keadaan serta perilaku dari objek penelitian (Koentjaraningrat, 1997). Dengan melalui teknik pengumpulan data observasi, peneliti dapat mengkaji lebih dalam serta mempelajari lebih rinci terkait dengan organisasi keagamaan Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merujuk pada pendekatan dalam mencari data dengan menggunakan catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan dokumentasi visual seperti foto kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi (Arikunto, 2011). Dengan dokumentasi juga dapat memperkuat data peneliti agar peneliti mendapat data yang benar-benar bisa dilihat sesuai dengan fakta di lapangan.

Adapun dalam penelitian ini penulis menghimpun berbagai dokumen penting yang relevan dengan objek yang akan diteliti seperti struktur kepengurusan organisasi Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya, dan lainnya.

##### c. Wawancara

Metode pengumpulan data berikutnya yaitu wawancara yang mana dalam wawancara melibatkan interaksi komunikasi verbal antara

pewawancara dan subjek yang diwawancarai. Wawancara mendalam dengan informan dilakukan melalui proses tanya jawab dan diskusi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab serta diskusi dengan informan. Wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara terstruktur, di mana peneliti akan mengikuti pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan. Metode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam pelaksanaan wawancara.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informannya yaitu seperti ketua Front Persaudaraan Islam, pengurus yang ada dalam struktur kepengurusan dan beberapa masyarakat Kecamatan Kroya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Menganalisis hasil penelitian berarti melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap temuan di lapangan dan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan. Teknik analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun temuan penelitian, termasuk hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan catatan lapangan, secara sistematis sehingga membentuk suatu kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini analisis data dimulai dari reduksi data, kemudian penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Pada tahapan reduksi data ini peneliti memeriksa jawaban dari informan atau responden dari sesi wawancara. Tahapan reduksi data ini memiliki tujuan agar peneliti melakukan adanya 'penghalusan data' dalam konteks memperbaiki kalimat serta kata dan juga menerjemahkan ungkapan-ungkapan setempat ke bahasa yang lebih universal atau umum (Indonesia) serta memberikan keterangan tambahan ataupun sebaliknya membuang keterangan yang berulang kali (Moleong, 2009).

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data yang mana berupa himpunan atau sekumpulan data dan informasi yang tersusun yang memberikan peluang adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan langkah atau tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data

memberikan makna atas data yang dihasilkan dari wawancara kepada ketua, pengurus, serta anggota dari Front Persaudaraan Islam. Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis makna yang berupa jawaban atau hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah seluruh data wawancara dianalisis, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan sebagaimana yang tercantum. Dalam penulisan penelitian, sistematika pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan data yang dihimpun memiliki struktur yang terorganisir. Struktur penyajian penelitian ini mencakup lima bab, yang apabila dirinci adalah seperti berikut ini:

Pada bab I penelitian ini berisikan penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan.

Dalam bab II berisi bagaimana bentuk adaptasi Front Pembela Islam pasca pembubaran di Kecamatan Kroya.

Pada bab III, berisikan bagaimana strategi dan taktik yang digunakan oleh Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya untuk beradaptasi pasca pembubaran.

Dalam bab IV terdiri dari hasil dan pembahasan yang merupakan temuan dari penelitian.

Terakhir pada bab V sebagai bab penutup, menyoroti kesimpulan utama, hasil-hasil pembahasan, serta analisis mendalam atas temuan yang telah dikumpulkan selama penelitian.

## **BAB II**

### **ADAPTASI FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) PASCA PEMBUBARAN di KECAMATAN KROYA**

#### **A. Front Pembela Islam**

Front Pembela Islam adalah salah satu gerakan atau organisasi Islam yang memiliki sejarah berdiri dengan resmi pada tanggal 17 Agustus 1998 yang pada saat itu bersamaan dengan tanggal 24 Rabiuts Tsani 1419 Hijriyah, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Umm yang ada di Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Gerakan atau organisasi yang resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998 ini dipelopori oleh banyak pihak mulai dari haba'ib, mubaligh, ulama, serta aktivis muslim dan juga ada beberapa dorongan dari umat Islam. Adapun tokoh yang menjadi pelopor serta memiliki pengaruh besar dalam berdirinya Front Pembela Islam di Indonesia yaitu Habib Muhammad Riziq Shihab atau yang kerap dikenal dengan Habib Riziq yang kemudian menjadi ketua umum dari Front Pembela Islam di Indonesia pertama. Dalam masa kepemimpinan beliau FPI mengalami perkembangan yang cukup banyak serta dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia. (Dalimunte, 2018).

Pada awal kemunculannya, gerakan atau organisasi Front Pembela Islam ini berangkat karena adanya rasa bahwa menurunnya peran dari negara yang mana hal tersebut menimbulkan hilangnya ketertiban hukum di tengah masyarakat (Bayad, 2017). Selain itu, berdirinya gerakan Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa dipisahkan dari realita sosial yang pada awal era reformasi tahun 1998, kondisi penegak hukum dan pemerintahan yang dianggap lemah. Keadaan ini dipicu oleh meningkatnya tindakan zalim dan maraknya perilaku maksiat di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini terkait dengan kerusakan moral yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam hal ini memerlukan partisipasi dari kelompok umat ini untuk melawan tindakan zalim dan mengatasi segala bentuk kemunkaran, meskipun dengan risiko perjuangan yang tinggi, demi menjaga agar negara terhindar dari kerusakan yang dapat mengancam eksistensinya (Dalimunte, 2018).



Selain hal tersebut terdapat beberapa hal yang juga menjadi latar belakang terbentuknya Front Pembela Islam (FPI) diantaranya yaitu:

1. Adanya rasa tanggung jawab para ulama dan tokoh agama Islam terhadap Allah serta Rasul karena adanya perilaku dari umat Islam yang semakin jauh dari syariat Islam
2. Adanya prinsip atau landasan serta kewajiban dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Serta minimnya perhatian dan pengawasan sosial baik dari organisasi sosial politik maupun pemerintah terhadap hak-hak mayoritas muslim di Indonesia.

Kemudian tokoh lain yaitu Al-Zastrouw juga mengemukakan bawasannya berdirinya Front Pembela Islam (FPI) tak lepas dari kondisi dan situasi sosial-politik di Indonesia, diantaranya yaitu; Yang pertama adanya perasaan menderita yang di alami oleh umat Islam di Indonesia yang disebabkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh para penguasa. Kemudian adanya kegagalan aparat negara dalam menegakkan hukum di masyarakat. Ketiga, umat muslim memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat dan mempertahankan nilai-nilai serta martabat Islam. Serta yang keempat yaitu kewajiban setiap muslim menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dari hal tersebut, berdiri serta lahirnya organisasi Front Pembela Islam tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa reformasi yang mana pada masa itu merupakan beberapa situasi penting dalam perubahan sosial politik di Indonesia (Ngatawi, 2006). Sehingga dari penjelasan mengenai beberapa hal yang melatar belakangi tersebut membuat ulama, habaib, dan kyai terdorong untuk mendirikan sebuah organisasi atau gerakan islam dengan prinsip guna mengakkan nilai *amar ma'ruf nahi munkar* (Dalimunte, 2018).

Nama dari organisasi FPI terdiri dari 3 unsur kata yaitu Front, Pembela, dan Islam. Disebut dengan Front, karena fokus utamanya adalah pada kegiatan yang konkret, terutama dalam bentuk action atau tindakan yang jelas dan nyata dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan utama dari itu adalah untuk berada di posisi terdepan dalam melawan dan menentang segala bentuk kejahatan. Apabila kita melihat kembali ke belakang dan kilas balik sejarah, dapat dilihat

bahwa pada zaman dahulu, para Sahabat Radhiyallahu 'anhum selalu berlomba-lomba untuk menduduki posisi terdepan dalam setiap peperangan melawan musuh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal tersebut juga sama halnya dengan Front Pembela Islam (FPI) yang mana mereka memperlihatkan semangat dan keberanian untuk menjadi garda terdepan dalam menjalankan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* serta syariat Islam. Disamping itu, makna dan arti dari unsur nama dalam FPI yaitu Pembela yang mana dalam konteks gerakan Islam, disebut dengan pembela maksudnya adanya harapan agar gerakan atau organisasi tersebut senantiasa memiliki sikap yang pro aktif dalam membela nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kemudian unsur kata yang ketiga yaitu Islam yang mana maknanya menunjukkan bahwasannya perjuangan dari aksi dan gerakan dari Front Pembela Islam berjalan dengan belandaskan ajaran Islam (Harahap, 2020).

Berbicara mengenai sebuah gerakan atau organisasi, pastinya dalam sebuah organisasi atau gerakan berangkat dari sebuah kegelisahan, yang kemudian terdapat tujuan yang ingin dicapai, serta adanya rasa solidaritas antar individu dalam sebuah gerakan atau organisasi tersebut. Sama halnya dengan Front Pembela Islam yang memiliki adanya visi misi gerakan, tujuan, serta agenda atau kegiatan yang dilakukan sebagai sebuah wadah umat Islam. Adapun tujuan dari didirikannya Front Pembela Islam yaitu untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Definisi atau makna dari *amar ma'ruf nahi munkar* sendiri yaitu ajaran dan tindakan yang mendorong individu ataupun kelompok untuk melakukan kebaikan dan menghindari segala bentuk kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan makna *amar ma'ruf nahi munkar* secara istilah merupakan sebuah proses mengajak kebaikan yang mana bertujuan untuk memperluas ajaran Islam (Abbas, 2020).

Disamping adanya tujuan dari berdirinya Front Pembela Islam juga mempunyai visi misi sebagai sebuah gerakan atau organisasi. Visi dari gerakan Front Pembela Islam yaitu penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai satu-satunya solusi guna menjauhkan dari kemungkaran. Sedangkan misi dari gerakan Front Pembela Islam adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara kaffah atau menyeluruh dalam segala aspek kehidupan yang mana memiliki tujuan untuk

membentuk umat yang taat beragama, hidup dalam lingkungan yang baik dan berkah, serta mendapatkan ridho dari Allah SWT (Syihab, 2008). Selain adanya tujuan, visi dan misi Front Pembela Islam juga memiliki prinsip gerakan yang mana terdapat 5 prinsip yaitu; Allah adalah Tuhan kami serta tujuan kami, Muhammad Rasulullah adalah teladan kami, Al-Qur'anul Kariim adalah Imam kami, Al-Jihad adalah jalan kami, dan yang terakhir yaitu As-Syahadah adalah cita-cita kami. Dari adanya lima prinsip tersebut juga sejalan dengan apa yang menjadi semboyan gerakan dari Front Pembela Islam yaitu "*Hidup Mulia atau Mati Syahid*".

Dalam gerakan Front Pembela Islam selain terdapat tujuan, visi dan misi kemudian juga adanya prinsip gerakan terdapat juga paham atau pandangan terkait ghiroh atau perjuangan yang mana adalah "Bagi Mujtahid di fitnah itu biasa, di bunuh berarti syahid, di penjara adalah uzlah dan di usir adalah wisata atau tamasya" (Syihab, 2008). Adanya paham serta doktrin dalam berjuang di Front Pembela Islam memiliki tujuan guna memberikan perlindungan serta memperkuat niat dan ghiroh para aktivis FPI sehingga nantinya mampu mengamalkan nilai-nilai perjuangan dari FPI secara baik. Berbicara mengenai doktrin perjuangan, dalam gerakan FPI terdapat 5 doktrin perjuangan yaitu; 1) Mengikhhlaskan niat, 2) Memulai segala sesuatu dari diri sendiri, 3) Harus ditegakkannya kebenaran, 4) Setiap yang bernyawa pasti akan mati, 5) Mujahid diatas para musuhnya (Ngatawi, 2006).

Dalam melakukan action ataupun gerakannya, Front Pembela Islam berlandaskan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berasaskan pada prinsip-prinsip Islam serta memiliki keyakinan sesuai dengan Aqidah Ahlussunah wal Jama'ah. Sejalan dengan Aqidah tersebut, seluruh pengikut Ahlussunah wal Jama'ah sepakat bahwa setiap hadits yang sah, baik *mutawatir* maupun *ahad*, wajib dijadikan panduan dalam hal aqidah, syariat, dan akhlak. Selain itu, pengikut Ahlussunah wal Jama'ah selalu membuka ruang untuk ijtihad sepanjang masa bagi mereka yang ahli dalam bidangnya. Dengan demikian, FPI menghargai individu yang mengikuti madzhab tertentu atau tidak, dengan penekanan pada saling menghormati (Huda, 2019).

Berdasarkan realita sosial, gerakan Front Pembela Islam pada awal berdiri bukanlah seperti gerakan massa Islam atau organisasi massa seperti yang lainnya yang mana memiliki konstitusi yang jelas seperti Aturan Dasar (AD) ataupun Aturan Rumah Tangga (ART) meskipun pada Front Pembela Islam memiliki struktur organisasi, akan tetapi FPI ini tidak memiliki peraturan yang terstruktur dan tidak terdefinisi dengan baik dan jelas. Dalam eksekusinya, FPI lebih cenderung mengikuti atau bergantung pada apa yang menjadi kebijakan para penguasa. Dalam pengambilan keputusan, FPI hanya berdasarkan pada kesepakatan sementara yang sifatnya kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh FPI saja sehingga hal tersebut menjadikan kurang terstrukturnya administrasi organisasi. Kemudian apabila dicermati kembali, sebenarnya Front Pembela Islam ini bukan organisasi massa sebagaimana organisasi massa dengan basis Islam yang besar lainnya seperti Nahdlatul ‘Ulama maupun Muhammadiyah, melainkan lebih cenderung kepada komunitas yang bergerak untuk mencapai tujuan tertentu (Ngatawi, 2006).

Banyak unsur atau aspek penting dalam sebuah gerakan maupun organisasi seperti yang sudah dijabarkan diatas yaitu tujuan, visi dan misi, kemudian ada juga prinsip, serta bagaimana karakter dari suatu gerakan. Masih ada satu hal penting lagi dari sebuah gerakan atau organisasi yaitu adakah struktur kepengurusan dalam menggerakkan roda gerakan atau organisasi tersebut. Dalam gerakan Front Pembela Islam terdapat struktur kepemimpinan yang terbagi menjadi dua, yaitu Majelis Syura (Dewan Tertinggi Front) dan Majelis Tanfidzi (Badan Pengurus Harian). Selain itu, ada juga struktur dalam Front Pembela Islam yang terbagi menjadi enam yaitu (Syihab, 2008);

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mana ini ada pada tingkatan pusat
2. Dewan Pimianan Daerah (DPD) berada di tingkatan provinsi
3. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang ada pada tingkatan wilayah kabupaten dan kotamadya
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada pada tingkat kecamatan
5. Ada Pos Komando (Posko) yang berada di tingkat kelurahan atau desa
6. Serta ada Dewan Perwakilan Front (DPW) untuk tingkatan di luar negeri.

Selain terdapatnya dua struktur dalam Front Pembela Islam, mereka juga memiliki adanya empat lembaga otonom sebagai berikut; Lembaga Pembantu Maksiat Front (PMF), Lembaga Dakwah Front (LDF), Lembaga Ekonomi Front (LEF), dan juga Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF). Adapun anak organisasi yang dimiliki oleh Front Pembela Islam, sebagaimana berikut;

1. Laskar Pembela Islam (LPI) yang mana ini adalah para pemuda dari Front Pembela Islam yang memiliki tugas menjadi satgas (satuan tugas) organisasi barisan serba guna.
2. Mujahadah Pembela Islam (MPI) yaitu barisan muslimat Front Pembela Islam.
3. Front Mahasiswa Islam (FMI) merupakan perkumpulan mahasiswa yang aktif dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* serta mereka juga menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan kemampuan intelektual yang mereka miliki.
4. Serikat pekerja Front (SPF) ini adalah himpunan anggota FPI dari berbagai kalangan seperti pegawai, buruh, karyawan di berbagai perusahaan dan pabrik (Sa'adah, 2020).

### **B. Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya**

Front Pembela Islam atau yang sering disebut dengan FPI didirikan oleh habaib, ulama, serta mubaligh dan aktivis muslim yang dipelopori oleh Habib Rizieq pada 17 Agustus 1998 sehingga resmi berdirinya Front Pembela Islam di Indonesia. Keadaan yang melatarbelakangi berdirinya Front Pembela Islam pada saat itu antara lain adalah lemahnya kondisi penegak hukum dan pemerintah, serta meningkatnya tindakan dzalim atau maraknya perilaku maksiat di tengah masyarakat (Dalimunte, 2018). Dengan kondisi demikian, sehingga para tokoh berinisiatif untuk mendirikan sebuah gerakan atau organisasi masyarakat guna menegakkan ajaran-ajaran agama Islam yang sudah sangat jauh ditinggalkan oleh umat manusia sebagaimana prinsip ataupun tujuan utama dari Front Pembela Islam yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dewasanya, didirikannya Front Pembela Islam diharapkan dapat menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam segala aspek kehidupan (Husni, 2010). Berdasarkan perkembangan

serta pergerakannya Front Pembela Islam menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk di wilayah pulau Jawa khususnya di Kecamatan Kroya.

Berdirinya Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya dilatarbelakangi adanya rasa tanggung jawab sebagai umat Islam untuk menegakkan serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan melihat fakta di lingkungan Kecamatan Kroya yang ada saat itu banyak sekali kemaksiatan merajalela seperti judi, tempat karaoke, adanya sabung ayam, serta maraknya penjual minuman keras dan tempat hiburan malam yang disalah gunakan dengan bebas karena hal tersebut juga dikarenakan adanya "oknum" aparat dibelakang mereka (Kholidin, 2024). Berdasarkan rasa dan keadaan yang melatarbelakangi hal tersebut, pada tahun 2003 Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya resmi dibentuk. Sebelum Front Pembela Islam berdiri di Kecamatan Kroya, dalam lingkup wilayah sekitar Kecamatan Kroya khususnya di Kabupaten Cilacap yang menjadi cikal bakal atau embrio lahirnya gerakan Front Pembela Islam adalah di Kecamatan Gandrungmangu terlebih dahulu ada yang kemudian disusul dengan berdirinya Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya yang mana dalam pendiriannya dipelopori oleh beberapa tokoh, yaitu KH.Kholidin, Tugiyono, Hadi Sobirun, dan Akhmad Muntolib (Kholidin, 2024).

Setelah terbentuknya Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya pada saat itu, kemudian gerakan ini makin melebarkan sayap memperluas wilayah perjuangan di wilayah Kabupaten Cilacap sehingga terbentuklah Front Pembela Islam di berbagai kecamatan yang masuk pada wilayah Cilacap Timur seperti Kroya, Sampang Nusawungu dan lainnya. Atas terbentuknya Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya, kemudian para tokoh pendiri serta beberapa aktivis yang tergabung mulai menyebarkan dan mulai eksis di wilayah Kecamatan Kroya dengan berbagai cara seperti berdakwah, membangun hubungan yang baik dengan stakeholder serta masyarakat. Seiring berjalannya waktu, gerakan dari Front Pembela Islam mulai mendapat banyak perhatian dari masyarakat di Indonesia yang tentunya hal ini juga berdampak juga terhadap gerakan Front Pembela Islam di cabang baik provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Oleh karena itu pada tahun 2016 dilaksanakannya pelantikan akbar DPW Front Pembela Islam

Kabupaten Cilacap bersama dengan DPW Front Pembela Islam Kabupaten Banyumas yang mana seluruh DPC FPI baik itu dari Kab.Cilacap maupun Kab.Banyumas dilantik secara bersamaan oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Islam di Indonesia (Solihun, 2024).

Resmi dilantiknya Front Pembela Islam Kecamatan Kroya pada saat itu menjadikan gerakan ini lebih aktif dan eksis lagi ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya. Dalam visi dan misinya yang mana yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya pun tak jarang bersinergi berkolaborasi bersama dengan aparat penegak hukum seperti polsek guna menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Biasanya, polsek mendapatkan laporan dari masyarakat seperti adanya indikasi di wilayah tertentu terdapat tindakan yang meresahkan masyarakat diantaranya yaitu yang kerap kali terjadi di Kecamatan Kroya adalah adanya sabung ayam dan jual beli minuman keras. Dengan action dan kontribusi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam sehingga di Kecamatan Kroya bisa dikatakan bahwa Front Pembela Islam merupakan salah satu gerakan atau organisasi yang cukup eksis dan aktif berjalan serta berkegiatan. Selain itu, Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya juga selalu mengikuti instruksi dari atas baik itu DPW FPI Kabupaten ataupun Provinsi dan Pusat. Dalam kurun waktu 4 tahun setelah terlantik, Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya selama itu pula bergerak dan berdakwah untuk tegakknya amar ma'ruf nahi munkar sesuai aturannya. Hingga sampai pada akhir tahun 2020 yang mana pada saat itu pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam di Indonesia. Dengan berdasarkan keputusan dan kebijakan pemerintah yang mana hal tersebut tertera dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 sehingga baik itu DPP FPI sampai dengan DPC FPI diseluruh Indonesia termasuk di Kecamatan Kroya dibubarkan (Lediya, 2022).

### **C. Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Pasca Pembubaran (Front Persaudaraan Islam)**

Pembubaran gerakan Front Pembela Islam pada tahun 2020 yang secara resmi pemerintah memberhentikan segala bentuk kegiatan dan aktivitas serta melarang penggunaan simbol dan atribut dari Front Pembela Islam di Indonesia sangat menyita perhatian publik dan masyarakat disegala penjuru negeri pada saat itu. Disamping itu, Habib Rizieq selaku imam besar dari Front Pembela Islam juga menjadi sorotan publik sehingga dalam hal ini Habib Rizieq dan segenap pengurus DPP FPI Indonesia menyikapi kebijakan pemerintah dengan “Kita hadapi, enggak perlu tegang” (Irfan Kamil, 2020). Meskipun begitu, Habib Rizieq tetap mengindahkan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah yang membubarkan gerakan Front Pembela Islam diseluruh tingkatan yang terbentuk di Indonesia sehingga hal tersebut diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota Front Pembela Islam di Indonesia.

Tidak hanya berhenti sampai situ, gerakan FPI ini pun langsung mengambil langkah baru tanpa membutuhkan waktu yang lama setelah dibubarkannya Front Pembela Islam. Setelah resmi dibubarkan, sejumlah tokoh dari gerakan Front Pembela Islam pun mendeklarasikan “Front Persatuan Islam”. Pendeklarasian adanya perkumpulan atau gerakan baru setelah Front Pembela Islam dibubarkan dilakukan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam pada saat itu yaitu Ahmad Shabri Lubis dan Munarman selaku sekretaris dari Front Pembela Islam serta 19 orang lainnya. Terjadinya pendeklarasian tersebut dilakukan oleh tokoh dan pengurus DPP FPI yang mana dilaksanakan di suatu tempat di Jakarta (Ihsanuddin, 2020). Kemudian selang beberapa hari, gerakan tersebut melakukan pendeklarasian lagi setelah sebelumnya mendeklarasikan diri dengan nama baru yang kini berganti kembali dari Front Persatuan Islam menjadi Front Persaudaraan Islam seperti yang dikatakan oleh Aziz Yanuar selaku kuasa hukum FPI. Adanya perubahan nama tersebut dikarenakan gerakan atau organisasi ini masih baru dan belum memiliki AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) serta perubahan nama menjadi Front Persaudaraan Islam ini merupakan hasil kesepakatan bersama dan adanya masukan dari Habib Rizieq pada saat itu



(Berutu, 2021). Adanya pendeklarasian terkait perubahan nama yang dilakukan oleh para tokoh dan petinggi dari gerakan FPI pada saat itu membuat hal ini pun kemudian diikuti serentak oleh cabang atau tingkatan dari FPI di berbagai daerah yang ada di Indonesia termasuk di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Berubahnya nama Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam yang kemudian disepakati kembali menjadi Front Persaudaraan Islam ini menjadi pintu baru guna menjalankan roda organisasi atau gerakan yang baru mulai dari logo, atribut, lembaga, serta struktur pun semua berubah baik pada tingkatan nasional atau pusat, provinsi atau wilayah, serta kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Setelah adanya deklarasi perubahan nama, gerakan yang ada di Kecamatan Kroya tidak banyak berubah secara struktural, akan tetapi tetap ada beberapa perubahan dengan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan apa yang disepakati secara bersama dari pengurus pusat dan imam besar Habib Rizieq (Kholidin, 2024). Perubahan tersebut diantaranya yaitu lambang, nama, lembaga otonom, visi dan misi, dan beberapa hal lainnya. Selain itu, setelah deklarasi perubahan nama menjadi Front Persaudaraan Islam kemudian pada 16-17 Maret 2022/ 13-14 Sya'ban 1443 H Dewan Pengurus Pusat mengadakan Musyawarah Nasional I guna membahas serta menetapkan ketetapan dan keputusan serta mengesahkan anggaran dasar dari Front Persaudaran Islam. Musyawarah Nasional perdana ini dilaksanakan secara terbatas yang mana hanya diwakili oleh 7 pengurus dari utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi. Adapun terlaksananya kegiatan tersebut bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyyah Lebak, Provinsi Banten (Bila, 2022).

Berdasarkan hasil ketetapan dan keputusan dalam Musyawarah Nasional I pada 2022 tersebut menghasilkan diantaranya yaitu terkait lambang dari Front Persaudaraan Islam berlambang sebagaimana Dua Lingkaran Tasbih Mutiara Putih yang mana terdiri dari lingkaran luar ada 99 biji tasbih, 33 biji tasbih di lingkaran dalam, di puncak tasbih lingkaran luar ada 1 Ka'bah dengan kiswah hitam dan pemisah tasbihnya ada 2 qubah hijau dengan tiang emas, dan di tasbih lingkaran dalam memiliki 3 pemisah qubah emas bertiang emas, serta dalam setengah lingkaran atas terdapat tulisan dalam bahasa Arab dan pada setengah lingkaran bawah

tertulis dalam bahasa Indonesia “Front Persaudaraan Islam” yang mana dengan warna dasar hijau tua, kemudian di antara tulisan lingkaran atas dan tulisan lingkaran bawah dipisah dengan bintang hijau terang, sedangkan di tengah lambang terdapat lingkaran hijau terang dengan tulisan 3 huruf besar “FPI”, dan semua huruf tulisan arab maupun Indonesia berwarna putih (Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam, 2022).



Gambar 2. 1 Logo FPI

<https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fylel24h0kaa61.jpg>

Ketetapan yang selanjutnya yaitu terkait asas dari Front Persaudaraan Islam yang mana terbagi menjadi dua yaitu asas keagamaan dan asas kebangsaan. Pada asas keagamaan, Front Persaudaraan Islam berasaskan Islam dan untuk asas kebangsaan yaitu Pancasila. Berdasarkan adanya ketetapan mengenai asas gerakan yang berasaskan Pancasila dalam aspek kebangsaan, maka bisa disimpulkan bahwasannya gerakan ini tidak bertentangan dengan negara. Adapun hal lainnya yang ditetapkan dalam musyawarah nasional I pada saat itu adalah mengenai aqidah dan madzhab dari Front Persaudaraan Islam yang mana gerakan ini beraqidahkan *ahlus sunnah wal jama'ah* dan bermazhabkan *aqidah asy'ari dan fiqih syafi'i* (Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam Pasal 6, 2022). Dalam aspek wawasan keagamaan, Front Persaudaraan Islam memiliki 5 (lima) wawasan keagamaan, yaitu;

1. FPI berperdoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas
2. Motto dari FPI yaitu “Ikhlās dan ikhtiyar serta tawakal mencari Ridho Allah SWT
3. FPI memiliki semboyan yaitu “Bangun persaudaraan dan bina persatuan serta rajut kebersamaan dalam taat kepada Allah SWT”

4. Filsafat dalam FPI yaitu “Pertolongan Allah SWT ada pada persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan”
5. FPI memiliki doktrin yang mana yaitu “Berjuang adalah kewajiban sedang kemenangan adalah anugerah Allah SWT.

Disamping itu, dalam sebuah gerakan atau organisasi pastinya memiliki visi dan misi guna mencapai tujuan bersama dari sebuah gerakan. Hal ini pun dimiliki oleh gerakan Front Persaudaraan Islam yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional perdana. **Visi** dari Front Persaudaraan Islam yaitu terwujudnya kehidupan Islami yang *kaffah* dan *Rahmatan Liil ‘Alamiin* serta penuh rasa persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Sedangkan untuk **misi** dari Front Persaudaraan Islam adalah menekankan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan serta persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan (Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam Pasal 9, 2022).

Masuk dalam unsur paradigma, aktivitas, dan program juga hal tersebut merupakan salah satu yang juga ditetapkan pada Musyawarah Nasional I oleh Front Persaudaraan Islam di 2022. Pada hal ini, gerakan Front Persaudaraan Islam memiliki 5 (lima) paradigma juang yaitu; bela agama dan bela negara, da’wah dan pendidikan Islam, penegakkan hukum dan HAM, kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta pengembangan media yang jujur dan amanah. Disamping itu, gerakan Front Persaudaraan Islam mempunyai tiga program juang unggulan yaitu;

1. **Deliberalisasi** yaitu menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan ideologi liberal yang menyerang Islam dan Pancasila serta melahirkan bahaya Atheis dan Komunis serta kapitalis.
2. **Deradikalisasi** yaitu menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan Ideologi radikal yang merusak Islam dan Pancasila serta melahirkan bahaya ekstrimis dan teoris serta separatis.
3. **Aswajaisasi** yaitu menyebarluaskan ajaran ahlus sunnah wal jama’ah, khususnya Madzhab Aqidah ‘Asy’ari dan Madzhab Fiqih Syafi’i, yang menebar *Rahmatan Liil ‘Alamiin* melalui dakwah dan hisbah serta jihad konstitusional.

Tidak jauh berbeda dengan Front Pembela Islam yang telah bubar, tatanan kepengurusan atau struktur dari gerakan Front Persaudaraan Islam pada Anggaran Dasar yang telah ditetapkan terbagi menjadi beberapa macam. Dimulai dari tingkatan kepemimpinannya yaitu; Dewan Pimpinan Pusat atau yang disingkat dengan DPP yang mana ini berada di tingkatan nasional atau pusat, kemudian DPD atau Dewan Pimpinan Daerah yang berada di Provinsi serta Dewan Pimpinan Luar Negeri atau DPLN. Disamping itu, setiap tingkatan terdiri dari penasihat dan majelis syura serta mahkamah front dan dewan tanfidzi (Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam Pasal 14, 2022).

Sama halnya dengan gerakan atau organisasi umum lainnya yang mana selain mempunyai adanya tingkatan kepemimpinan juga memiliki adanya struktur kepengurusan yang bertujuan untuk menjalankan roda organisasi serta agar eksistensi gerakan atau organisasi dapat berjalan dengan baik dan teratur dan terstruktur (Busairi, 2019). Oleh karena itu, dibentuklah struktur kepengurusan dari Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya yang terdiri dari Ketua yaitu Bapak Tugiono, kemudian Sekretaris Bapak Teguh Rahayu, dan Bendahara Bapak Sobirun (Tugiono, 2024). Namun, untuk saat ini kepengurusan Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya belum lengkap secara struktural misalnya seperti adanya lembaga otonom atau sayap juang sebagaimana yang menjadi ketetapan dari Dewan Pengurus Pusat. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Tugiono sebagai berikut:

“Pasca pembubaran dan pendeklarasian nama yang baru, kami (FPI di Kecamatan Kroya) secara struktur kepengurusan baru punya pengurus inti saja yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun untuk simpatisan atau relawan ketika ada komando atau acara yang membutuhkan banyak orang pasti selalu ada saja simpatisan yang ikut serta berkontribusi meskipun bukan pengurus.”

#### **D. Adaptasi Front Pembela Islam Pasca Pembubaran di Kecamatan Kroya**

Pasca pembubaran dan dilaksanakannya Musyawarah Nasional pada tahun 2022, Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya pun mengikuti instruksi atau komando dari Dewan Pengurus Pusat ataupun Wilayah dan Cabang. Kemudian

pada tahun 2023, Front Persaudaraan Islam Kecamatan Kroya mengikuti pelantikan akbar yang diselenggarakan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada 26 November 2023 di Gentasari, Kecamatan Kroya yang mana dihadiri oleh Dewan Pimpinan Cabang dari banyak Kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Dalam hal ini, khususnya delegasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Front Persaudaraan Islam Kabupaten Cilacap mengirimkan delegasi dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap termasuk Kecamatan Kroya yang juga selaku tuan rumah pada kegiatan tersebut (Sukses, Pelantikan Pengurus DPC FPI dan Sayap Juang Kabupaten Cilacap, 2023). Tidak hanya pengurus Front Persaudaraan Islam saja yang dilantik pada saat itu, sayap juang juga turut serta dilantik yang mana sayap juang merupakan badan atau lembaga otonom dari Front Persaudaraan Islam (Kholidin, 2024).

Adanya pendeklarasian serta pelantikan yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam Jawa Tengah menjadikan angin segar untuk para pengurus dan simpatisan dalam melaksanakan visi misi gerakan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun disamping hal tersebut, terdapat satu hal menarik dari pendeklarasian pasca pembubaran dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam yaitu terkait gerakan atau organisasi Front Persaudaraan Islam tidak mendaftarkan diri kepada Kemendagri sebagaimana FPI yang sebelumnya terdaftar dalam Kemendagri. Berdasarkan hal tersebut, terdapat alasan mengapa Front Persaudaraan Islam yang baru tidak didaftarkan kepada Kemendagri bahwasannya adanya jaminan oleh konstitusi untuk kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pada pasal 28e (3) juncto putusan MK Nomor 82 Tahun 2013. Sehingga hal tersebut memiliki arti bahwa organisasi atau gerakan yang tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bukan malah dinyatakan atau dianggap bubar, akan tetapi hanya tidak terdaftar (Persada, 2021). Sehingga bisa dikatakan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Front Pembela Islam yang baru tanpa mendaftarkannya kepada Kemendagri oleh pemimpin dan pengurus serta simpatisan eks FPI adalah guna melanjutkan perjuangan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan meminimalisir

NKRI dari banyaknya kezaliman dan ketidakadilan (Jabbar, 2022). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan ketika peneliti melakukan wawancara oleh KH.Kholidin bahwa:

“Dengan dibubarkannya FPI oleh pemerintah tidak menjadikan FPI bubar begitu saja, makanya kami mendeklarasikan perubahan nama yang semula Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam dan itu komando dari Pusat dan Habib Rizieq. Semangat dari para pengurus serta rasa solidaritas simpatisan dan aktivis dari FPI untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar itulah yang menjadi landasan gerakan ini lahir dan bergerak kembali tanpa harus mendaftarkan organisasi atau gerakan Front Persaudaraan Islam ke Kemendagri.”

Berdasarkan pernyataan tersebut serta melihat realita bahwa seiring berjalannya waktu gerakan atau organisasi Front Persaudaraan Islam telah lahir dan berjalan lagi serta memutuskan untuk tidak mendaftarkan gerakannya kepada Kemendagri merupakan salah satu bentuk dari adaptasi yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam pasca pembubaran. Disamping itu, adaptasi juga dilakukan oleh gerakan Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya pasca pembubaran dengan berbagai cara, sebagaimana dijelaskan oleh pengurus Front Persaudaraan Islam pada saat penulis melakukan wawancara yang mana sebagai berikut:

1. Silaturahmi kepada *stakeholder* di lingkungan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan dinamika masyarakat, langkah silaturahmi kepada para pemangku kebijakan (*stakeholder*) di lingkungan masyarakat menjadi sebuah langkah yang krusial atau penting dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang baik antara gerakan atau organisasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks gerakan Front Persaudaraan Islam yang pada awalnya sudah berjalan dan eksis di tengah-tengah masyarakat kemudian terjadi pembubaran oleh pemerintah dan disusul dengan adanya pendeklarasian perubahan nama, hal ini menjadikan silaturahmi sebagai bentuk adaptasi guna membangun dan memelihara hubungan yang baik antara berbagai pihak. Silaturahmi dalam konteks ini tidak hanya sebatas pertemuan formal melainkan juga mencakup kepada interaksi yang berkelanjutan atau *continue* seperti misalnya adanya dialog terbuka, saling

mendengarkan, serta berbagi informasi guna memahami apa saja kebutuhan dan tujuan dari masing-masing pihak (Rosmala, 2021).

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan dari KH.Kholidin pada saat penulis melakukan wawancara, sebagai berikut:

“Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam pasca pembubaran itu yang pertama adalah silaturahmi kepada pemerintah setempat seperti pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa khususnya Desa Gentasari karena di desa tersebut Front Persaudaraan Islam menjadi ikon dari Kecamatan Kroya bahkan Kabupaten Cilacap. Dengan melakukan silaturahmi yang mana dengan maksud Front Persaudaraan Islam memperkenalkan diri kepada stakeholder bahwasannya FPI yang semula Front Pembela Islam kini menjadi Front Persaudaraan Islam dengan tatanan dan aturan yang baru dan masih eksis. Selain itu, tidak jarang juga intel atau pihak dari kepolisian sekitar mendatangi kami (Front Persaudaraan Islam) sehingga oleh kami ajak untuk berdialog dan saling sharing yang kemudian kami beritahukan bahwasannya FPI tetap ada dengan berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam dengan maksud kami mengenalkan bahwa FPI masih eksis (Kholidin, 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dilihat dalam konteks adaptasi pasca pembubaran maka langkah membangun silaturahmi dengan para pemangku kepentingan atau *stakeholder* ini menjadi sebuah bentuk langkah yang efektif untuk membangun kembali hubungan yang baik antar berbagai pihak. Melalui langkah silaturahmi ini, pihak pemerintah setempat dan pihak kepolisian dapat memahami dengan lebih baik bagaimana visi dan misi dari Front Persaudaraan Islam yang berbeda dari Front Pembela Islam. Disamping itu, saling sharing dan adanya penjelasan bahwasannya Front Persaudaraan Islam itu tidak hilang melainkan mengalami transformasi atau perubahan juga memiliki dampak guna membangun pemahaman yang lebih baik serta mencegah adanya miskonsepsi yang mungkin muncul dari berbagai pihak. Dengan demikian, silaturahmi menjadi sarana untuk menjembatani pemahaman antara organisasi, pihak kepolisian, dan pemerintah setempat demi terjalinnya kerjasama yang harmonis dan saling mendukung.

2. Adanya kegiatan-kegiatan yang merangkul semua kalangan masyarakat.

Pasca dibubarkannya gerakan Front Pembela Islam yang kemudian berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, hal tersebut pastinya mengalami perubahan dinamika dalam sebuah gerakan. Selain harus membangun kembali hubungan atau silaturahmi dengan para *stakeholder*, bentuk adaptasi lainnya yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat merangkul semua kalangan masyarakat di Kecamatan Kroya diantaranya adalah mendatangkan da'i baik itu dari tokoh agama dari lingkungan sekitar maupun ulama besar dan mengadakan kajian yang mana hal ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada ummat (masyarakat) bahwasannya Front Persaudaraan Islam tidak jauh berbeda dengan gerakan atau organisasi yang berbasis keagamaan khususnya Islam seperti yang lainnya.

Bentuk adaptasi dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang merangkul semua kalangan masyarakat ini memiliki tujuan untuk merangkul dan membangun kembali hubungan positif baik itu antar pengurus dengan *stakeholder*, atau antar pengurus dengan masyarakat umum sehingga nantinya dapat memperkuat ikatan sosial serta meminimalisir asumsi-asumsi di tengah masyarakat pasca dibubarkannya Front Pembela Islam. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan yaitu perayaan milad Front Persaudaraan Islam yang diadakan setiap tahunnya dengan segenap rangkaian kegiatan, diadakannya rutinan kajian, keikutsetaan dalam upacara hari besar, dll (Solihun, 2024).



### **BAB III**

## **STRATEGI DAN TAKTIK FRONT PERSAUDARAAN ISLAM KECAMATAN KROYA PASCA PEMBUBARAN**

Pada bab ini peneliti mencoba untuk mengeksplorasi pertanyaan atau rumusan masalah kedua yakni bagaimana strategi yang dilakukan FPI pasca pembubaran di Kecamatan Kroya yang kemudian di narasikan dengan temuan di lapangan oleh peneliti.

#### **A. Definisi Strategi**

Kata strategi awalnya dari bahasa Yunani “strategos” yang bermakna seluruh usaha yang meliputi paham perencanaan, metode dan teknik yang dipakai oleh militer guna tercapainya kemenangan di sebuah peperangan (Hamalik, 1993). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi mempunyai makna sebagai perencanaan yang cermat mengenai kegiatan guna mencapai sasaran atau target khusus. Strategi merupakan bagian penting dari adanya sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi atau gerakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2007, hal. 1092).

Definisi strategi menurut beberapa tokoh antara lain yaitu John William Bennett, yang mana mendefinisikan strategi digambarkan sebagai arah yang dipilih oleh organisasi untuk diikuti dalam menggapai tujuan atau misinya (Bennett, 1996). Kemudian strategi juga memiliki definisi sebagai upaya yang digunakan untuk meraih sebuah hasil akhir yang mana hasil akhir itu memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi (Oliver, 2006). Disamping itu, Mintzberg menyatakan bahwasannya terdapat lima hal yang dapat digunakan untuk memahami strategi yaitu; rencana atau suatu arah langkah atau tindakan yang diinginkan secara sadar, cara, kemudian pola dalam rangkaian tindakan, posisi atau cara menempatkan gerakan atau organisasi dalam lingkungan, dan sudut pandang atau perspektif (Oliver, 2006, hlm. 2). Berdasarkan definisi strategi tersebut sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya strategi merupakan salah satu hal yang krusial dalam jalannya sebuah program atau

kegiatan dalam sebuah gerakan atau organisasi guna tercapainya cita-cita atau tujuan dari gerakan atau organisasi tersebut.

## **B. Strategi yang dilakukan Front Pembela Islam di Kecamatan Kroya Pasca Pembubaran**

### 1. *Survival Strategy*

Strategi survive (*survival strategy*) atau yang lebih dikenal dengan strategi bertahan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mempertahankan eksistensi serta berkembang ditengah-tengah kondisi lingkungan yang dinamis (Sulaiman A. , 2014). Bentuk dari *survival strategy* yang biasanya dilakukan salah satunya yaitu dengan melakukan perubahan nama. Pengambilan langkah dengan mengubah nama sebuah gerakan atau organisasi dinilai menjadi sebuah langkah strategis yang efektif yang mana dengan tujuan untuk memperbarui ataupun memperbaiki citra serta identitas dari sebuah gerakan atau organisasi, sehingga nantinya akan tetap relevan dan eksis di tengah-tengah masyarakat. Bentuk dari survival strategy tersebut juga dilakukan oleh gerakan Front Pembela Islam Indonesia.

Adanya SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020 yang pemerintah keluarkan saat itu menandakan ujung tombak dari seluruh gerakan dan kegiatan dari Front Pembela Islam. Pada SKB tersebut berisikan terkait dilarangnya berkegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan dari Front Pembela Islam. Akan tetapi, tidak lama setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama tersebut, para pengurus dan tokoh besar dari Front Pembela Islam langsung mengambil langkah dengan pendeklarasian nama atau perubahan nama menjadi Front Persaudaraan Islam (Bagaskara, 2021). Disamping mengambil langkah mengubah nama, Front Pembela Islam yang kini Front Persaudaraan Islam juga mengubah banyak aspek dari gerakan atau organisasi mereka seperti lambang, dan visi misi. Berdasarkan adanya deklarasi perubahan nama yang dilakukan oleh pengurus dan tokoh dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam, hal ini merupakan bentuk dari *survival strategy* atau strategi bertahan dari gerakan Front Pembela Islam. Bentuk *survival strategy* lainnya yang dilakukan oleh Front Persaudaraan

Islam pasca pembubaran yaitu bahwa gerakan ini memutuskan untuk tidak mendaftarkan gerakan atau organisasinya ke Kemendagri. Hal ini menjadi sebuah bentuk strategi bertahan sebuah gerakan pasca dibubarkannya Front Pembela Islam.

## 2. Eksistensi di Masyarakat

Pasca pembubaran oleh pemerintah, Front Pembela Islam telah mengambil langkah strategis agar tetap eksis dan tetap pada tujuannya yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Disamping melakukan deklarasi perubahan nama sebagai wujud atau bentuk dari survival strategy gerakan, FPI yang kini menjadi Front Persaudaraan Islam lebih fokus kepada menjalin ukhuwah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara dengan para pengurus Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya (Kholidin, 2024);

“Setelah berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, sekarang fokus kami dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lebih kepada menjalin ukhuwah mbak, melalui pendekatan Islamiyyah, ukhuwah wathoniyyah, dan juga ukhuwah bashoriyyah. Untuk saat ini, kami (FPI) lebih sering dan lebih mengedepankan kepada terjun lapangan dalam bidang sosial misalnya ketika terjadi bencana alam serta hal-hal seperti bantuan sosial tanpa memandang bulu dan latar belakang. Tujuannya untuk kemanusiaan dan untuk mengembalikan kepercayaan ummat dan masyarakat mbak.”

Berdasarkan strategi yang kini digunakan oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya dengan lebih memfokuskan kepada aspek humanity, disamping itu Front Persaudaraan Islam dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* cenderung berbeda dari sebelumnya. Pada saat masih Front Pembela Islam, gerakan ini kerap kali melakukan aksi *sweeping* (penertiban) dengan kekerasan ketika ada kemaksiatan ataupun kezhaliman. Akan tetapi kini Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya dalam menegakkan nahi munkar lebih mengurangi gerakan terjun lapangan dalam hal *sweeping*, bukan meniadakan melainkan mengurangi dengan tetap dilakukan via media sosial khususnya via Grup WhatsApp. Melalui grup tersebut, biasanya FPI

menerima laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan-perbuatan maksiat seperti pesta minuman keras di tempat-tempat hajatan. Kemudian setelah menerima laporan, FPI meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti (Solihun, 2024). Meskipun mengurangi dalam gerakan di lapangan, Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya tetap berusaha untuk menjalankan dan *menegakkan amar ma'ruf nahi munkar* serta strategi itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan gerakan ini masih eksis di tengah-tengah masyarakat.

### 3. Strategi Kelembagaan

Front Persaudaraan Islam sebagai salah satu gerakan sosial yang berbasis agama tentu memiliki prinsip dan dasar nilai-nilai dari agama Islam. Sebagai gerakan yang berdiri untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan berlandaskan asas keagamaan yaitu agama Islam, sehingga nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, kebenaran menjadi landasan utama yang dijunjung tinggi oleh gerakan Front Persaudaraan Islam dalam menjalankan visi misinya (Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam, 2022).

Dalam konteks gerakan sosial yang biasanya memiliki suatu lembaga baik lembaga pendidikan ataupun non-pendidikan, kemudian pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal hal ini juga dimiliki oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya. FPI Kecamatan Kroya memiliki satu lembaga pendidikan non-formal yaitu Pondok Pesantren Darul Islah yang tepatnya berada di Desa Gentasari. Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Islah pun beragam seperti; kajian Kitab Tafsir Jalalain, kajian Kitab Safinatun Najjah, kemudian Kitab Da'watutammah, dan Kitab Nasoihul 'Ibad yang diikuti oleh para santri (Maftuhah, 2024). Dengan adanya pondok pesantren yang berada dibawah naungan FPI ini dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan dapat memperoleh dukungan lebih luas dari masyarakat dan sebagai bentuk keeksistensian dari gerakan Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya.

#### 4. Strategi Fundraising

Strategi *fundraising* terdiri dari dua kata yaitu “strategi” dan “fundraising”. Terdapat beberapa definisi terkait kata *fundraising* seperti yang tertera dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia *fundraising* memiliki arti penggalangan dana. Fundraising juga diartikan sebagai sebuah bentuk kegiatan penggalangan dana serta sumber daya dari masyarakat baik secara individu ataupun kelompok yang kemudian digunakan guna menggapai tujuan atau misi dari sebuah gerakan atau lembaga (Suparman, 2009). Definisi lain terkait fundraising yaitu adanya kegiatan mengumpulkan dana infaq, ataupun shadaqah dari masyarakat yang setelah itu dialirkan serta didayagunakan kepada orang yang berhak (Sani, 2010).

Dalam konteks gerakan sosial khususnya pada gerakan FPI yang ada di Kecamatan Kroya terlebih lagi gerakan ini memiliki sebuah lembaga pendidikan non-formal berupa pondok pesantren menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan dana atau fundraising ini menjadi hal yang krusial. Strategi fundraising yang digunakan oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya melibatkan pengurus serta para santri yang mana hal tersebut dilakukan secara mandiri misalnya, ketika akan ada kegiatan atau acara yang dalam skala besar seperti haul maka para pengurus dan santri akan door to door ke masyarakat guna menarik dana. Disamping itu, biasanya juga mengajukan proposal kepada pihak-pihak yang dianggap mampu seperti pemilik toko dilingkungan setempat, tokoh masyarakat, dan yang lainnya (Kholidin, 2024). Diambilnya langkah strategi fundraising dengan cara mandiri dan door to door tersebut juga ditujukan agar pengurus dan para santri membangun hubungan pendekatan lebih dekat secara langsung dengan masyarakat dan donatur serta menjelaskan secara detail terkait tujuan dari adanya penggalangan dana tersebut.

Sama halnya dengan yang terjadi dalam sistem pendanaan gerakan, para santri di pondok pesantren yang berada dibawah naungan Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya tidak dibebankan biaya setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus santri putri di Pondok Pesantren

Darul Islah, mereka menyatakan bahwasannya para santri hanya membayar ketika mendaftar saja selepas itu tidak ada tarikan biaya dari Abah dan Ibu. Akan tetapi, dengan inisiatif para santri akhirnya mereka membayar Rp 15.000,- setiap bulannya untuk biaya listrik saja, untuk makan para santri mengambil sayuran di kebun yang mana kebun tersebut memang milik Abah yang ditanamin sayuran (Maftuhah, 2024).

### **C. FPI Sebelum dan Pasca di Bubarkan**

Adanya dinamika atau perubahan yang terjadi menimbulkan perbedaan yang signifikan dari Front Pembela Islam sebelum dibubarkan dan pasca dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada Desember 2020. Sebagai sebuah gerakan Islam yang kontroversial, FPI sebelum dibubarkan kerap kali menuai pro dan kontra dari masyarakat karena aksi-aksi dari FPI tersebut. Namun, setelah dibubarkan oleh pemerintah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan baru mengenai apa saja yang membedakan Front Pembela Islam yang dulu dengan Front Persaudaraan Islam yang di deklarasikan setelah dibubarkannya FPI.

Sesuatu yang mendasar dalam sebuah gerakan atau organisasi yaitu apa visi dan misi dari sebuah gerakan atau organisasi. Dengan adanya visi dan misi, maka arah langkah dari sebuah gerakan atau organisasi bisa dilihat. Pada Front Pembela Islam atau sebelum FPI dibubarkan oleh pemerintah, gerakan atau organisasi tersebut mempunyai visi dan misi yaitu “penerapan syariat Islam secara kaffah dibawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut manhaj nubuwwah” (Arianto, 2019). Visi misi dari Front Pembela Islam tersebut tercantum pada Anggaran Dasar Pasal 6 yang mana pada pasal tersebut juga menjabarkan terkait pengertian dari masing-masing visi dan misi sebagaimana yaitu arti dari “penerapan syariat secara kaffah” dimaknai sebagai setiap orang memiliki kewajiban untuk menerapkan syariat islam dalam kehidupan masing-masing serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian pemaknaan yang kedua dalam pasal 6 Anggaran Dasar Front Pembela Islam yaitu terkait “khilafah Islamiyyah” yang

diartikan sebagai penerapan kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, serta pendidikan dan hukum pada dunia Islam (Arianto, 2019).



*Gambar 3. 1 Muktamar HTI di GBKI*

(Sumber : <https://nasional.kompas.com/image/2021/04/06/21392951/survei-smrc-mayoritas-responden-setuju-pembubaran-hti-dan-fpi>)

Berbicara mengenai Khilafah Islamiyyah yang terdapat pada visi dan misi Front Pembela Islam, konsep Khilafah sudah ada sedari awal Islam akan tetapi dalam konteks negara Indonesia yang modern, desas-desus mengenai khilafah mulai mengemuka pasca era reformasi 1998. Pada saat itu, ada beberapa gerakan Islam yang juga mengangkat adanya ide khilafah yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, serta Front Pembela Islam atau FPI. Akan tetapi, ketiga gerakan tersebut meskipun sama-sama memegang Khilafah Islamiyyah namun masing-masing gerakan memiliki perbedaan seperti gerakan HTI merupakan kelompok yang secara terang-terangan mendukung mengenai adanya penegakkan khilafah serta kerap kali gerakan ini mengkritik nasionalisme, kapitalisme, komunisme, serta demokrasi yang ada. Kemudian gerakan Majelis Mujahidin Indonesia yang sama-sama mengusung Khilafah namun gerakan ini berbeda dengan HTI karena MMI cenderung lebih menyoroti terhadap masalah penegakkan syariat Islam secara langsung di negara atau di lingkungan masyarakat (Nashir, 2007). Dalam pandangan para aktivis HTI, doktrin Khilafah Islamiyyah sebagai lawan ideologi yang siap menantang, bahkan mengubah konsep negara dan bangsa yang mana telah ditetapkan di Indonesia (Hilmy, 2011).

Visi dan misi dari Front Pembela Islam yang mana pada saat itu “penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah dengan melalui pelaksanaan da’wah penegakan hisbah dan pengamalan jihad, dengan pendekatannya yaitu amar ma’ruf nahi munkar” sehingga sebagai sebuah gerakan dalam upayanya untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, FPI melakukan tindakan kebajikan serta mencegah berbagai bentuk kemungkaran (Ngatawi, 2006). Maka ketika kebijakan pemerintah dinilai berlawanan dengan syariah FPI menentangnya baik dengan aksi secara halus hingga secara fisik seperti tindakan merusak fasilitas pemerintah (Ghozali, 2020). Adanya hal-hal dan realita di lapangan seperti itu sehingga Khilafah dianggap sebagai bentuk ancaman bagi ideologi Pancasila (Ahmad Basarah: Perlu Gerakan Pembudayaan Pancasila, 2016) sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang mana “bahwa khilafah merupakan isu yang memiliki potensi merusak struktur atau tatanan bernegara serta berdampak kepada radikalisme” (Cegah Perpecahan, Ormas Islam Harus Miliki Ideologi yang Sama, 2020). Maka, pada Desember 2020 segala bentuk kegiatan bahkan simbol dan atribut dari FPI dihentikan dan dilarang oleh pemerintah dengan keluarnya SKB No.220/4780 Tahun 2020 (Ali Maksum, 2021).

Dinamika yang terjadi tidak berhenti pada hal itu saja, setelah pemerintah mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh keenam tokoh tersebut respon dari para pengurus dan tokoh Front Pembela Islam melakukan deklarasi menjadi Front Persaudaraan Islam dan pada 2022 Front Persaudaraan Islam melaksanakan adanya Musyawarah Nasional yang salah satunya menetapkan adanya visi misi gerakan yang baru sebagaimana yaitu “terwujudnya kehidupan Islam yang kaffah dan Rahmatan Lil ‘Alamiin serta penuh rasa persaudaraan serta kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI” sedangkan untuk misinya adalah “menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan serta persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan” (Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam, 2022).

Disamping adanya perbedaan paling dasar yaitu dari visi misi Front Pembela Islam dengan Front Persaudaraan Islam, perbedaan selanjutnya yaitu dilihat dari



bagaimana upaya yang dilakukan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai sebuah tujuan atau visi dari gerakan. Sebelum di bubarkan Front Pembela Islam dalam tindakannya lebih banyak melakukan terjun ke lapangan dan juga kerap kali melakukan tindakan *sweeping* atau penggrebegan ke tempat-tempat maksiat seperti tempat karaoke, tempat judi, dan lain sebagainya. Selain itu, FPI sebelum dibubarkan juga kerap kali lebih sensi terhadap kelompok agama lain yang dinilai tidak satu paham dengan apa yang mereka pahami dari segi agama Islam (Efendi, 2016). Sedangkan pasca menjadi Front Persaudaraan Islam, upaya yang dilakukan berbeda dengan ketika masih Front Pembela Islam. Meskipun masih bergerak dengan terjun ke lapangan akan tetapi kini gerakan Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar cenderung lebih mengedepankan aspek *humanity* atau kemanusiaan serta menjalin ukhuwah dengan tidak melakukan tindakan *sweeping* (Kholidin, 2024).

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam sebuah gerakan atau organisasi yaitu terkait struktur kepengurusan yang dalam hal ini sebelum dibubarkan dan pasca dibubarkan mengalami perubahan. Pada Front Pembela Islam struktur kepengurusan terbagi menjadi beberapa bagian yang mana yaitu; lima badan khusus yang terdiri dari Badan Investigasi Front, Badan Pengkaderan Front, Badan Ahli Front, dan Badan Amil Zakat Front. Selain itu terdapat lima lembaga otonom yang mana terdiri dari lembaga pemantau maksiat Front, lembaga dakwah Front, lembaga ekonomi Front, lembaga bantuan Front, dan lembaga kemanusiaan Front. Disamping itu, FPI juga memiliki empat anak organisasi yang otonom yaitu ada laskar pembela Islam, mujahidah pembela Islam, serikat pekerja Front, dan Front mahasiswa Islam (Raharjo, 2020). Front Persaudaraan Islam memiliki struktur yang berbeda dengan Front Pembela Islam yang mana dalam Front Persaudaraan Islam mempunyai sayap juang yang terdiri dari 12 lembaga yaitu; HILMI yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, PRI yang membawahi bidang sosial kemasyarakatan atau relawan, BATIK (badan anti teroris dan komunis), FSI yang fokusnya dalam bidang sumber daya manusia santri, kemudian ada FMI yang menjadi wadah bagi para mahasiswa, API yaitu bagian advokat, MPI yang menaungi kewanitaan dan anak-anak, kemudian ada SPI yang membawahi bidang

buruh dan tenaga kerjaan, LEI lembaga ekonomi, LDP lembaga dakwah, LTF atau lembaga informasi, serta MTP atau madrasah tarbiyah yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan (Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam Pasal 15, 2022)



## **BAB IV**

### **MENAKAR KEMAMPUAN ADAPTASI FPI**

Pada bab ini berisi analisa seluruh temuan data yang ada di lapangan baik berupa wawancara ataupun observasi yang penulis temukan. Dengan melalui proses analisa tersebut nantinya penulis akan membagi ke dalam dua sub bab yaitu adaptasi FPI pasca pembubaran sebagai bentuk gerakan sosial dan strategi FPI pasca pembubaran.

#### **A. Adaptasi FPI Pasca Pembubaran sebagai Bentuk Gerakan Sosial**

Sebagai sebuah gerakan yang cukup eksis dan memiliki massa yang bisa dikatakan banyak di Indonesia, pastinya mengalami dan menghadapi banyak perubahan serta dinamika yang terjadi dari awal didirikan hingga saat ini. Salah satu dinamika yang dialami oleh Front Pembela Islam yaitu dihentikan serta dilarang untuk melakukan seluruh kegiatan bahkan tidak boleh lagi ada simbol ataupun atribut Front Pembela Islam di Indonesia. Hal tersebut secara resmi diumumkan oleh pemerintah bersamaan dengan keluarnya surat keputusan bersama mengenai hal tersebut. Sehingga, hal ini mengharuskan Front Pembela Islam berpikir dan mencari jalan lain agar tetap bertahan dengan tetap berpegang pada dasar dari gerakan Front Pembela Islam yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, tidak lama setelah resmi diumumkan bahwasannya Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah, para tokoh dan pengurus dari Front Pembela Islam langsung deklarasi terkait perubahan nama menjadi Front Persaudaraan Islam (Alam Mahadika, 2022). Terjadinya dinamika tersebut, membuat gerakan yang kini menjadi Front Persaudaraan Islam harus beradaptasi kembali baik di tingkat nasional ataupun di tingkat cabang dan wilayah masing-masing. Adaptasi terhadap dinamika yang terjadi juga dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya.

Dalam menghadapi gejolak dari dinamika yang terjadi, Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya melakukan beberapa hal dalam konteks beradaptasi pasca pembubaran dan dengan kondisi berubahnya nama gerakan mereka. Bentuk adaptasi

yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya yaitu; Silaturahmi dengan *stakeholder* di lingkungan masyarakat, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang merangkul semua kalangan masyarakat. Dilakukannya silaturahmi dengan *stakeholder* di lingkungan Kecamatan Kroya bertujuan agar hubungan yang akan dibangun antara pengurus dan anggota Front Persaudaraan Islam dengan para pemangku kebijakan di Kecamatan Kroya berjalan baik. Selain itu, bentuk adaptasi lainnya yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat merangkul seluruh kalangan masyarakat hal ini dibuktikan melalui salah satu kegiatannya yaitu milad Front yang diadakan setiap satu tahun sekali selama 2-3 hari dengan berbagai rangkaian acara seperti santunan anak yatim, khitan massal, dan sholawatan.



Gambar 4.1 Pamflet/Brosur untuk kegiatan Milad FPI ke 3  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)



Gambar 4.2 Acara milad Front Persaudaraan Islam ke-3  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Berdasarkan temuan lapangan tersebut terkait adaptasi yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya maka hal tersebut sejalan dengan konsep *reportar* yang digagas oleh Charles Tilly. Dalam konsep tersebut Tilly mengemukakan terdapat beberapa hal yang mencakup mengenai berbagai tindakan yang dilakukan sebuah gerakan sosial agar mencapai tujuan dari mereka. Beberapa hal tersebut yang dapat dijadikan kriteria bahwa gerakan sosial tersebut melakukan *repertoar* diantaranya adalah;

1. Gerakan yang terorganisir
2. Gerakan yang memiliki tujuan untuk adanya perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi
3. Gerakan sosial yang melakukan tindakan terorganisasi
4. Gerakan sosial melakukan tindakan menentang secara continue
5. Gerakan sosial membuat klaim secara publik.
6. Gerakan sosial melakukan aksi perlawanan secara konsisten.
7. Tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung, gerakan sosial memelihara politik perlawanan.
8. Gerakan sosial berkembang dan survive karena mereka dapat memanfaatkan peluang politik.
9. Memiliki solidaritas dan identitas.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan Charles Tilly tersebut serta dengan melihat hasil temuan lapangan bahwa Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya menggunakan silaturahmi dengan para *stakeholder* dan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang merangkul semua kalangan masyarakat sebagai bentuk adaptasi pasca pembubaran sejalan dengan beberapa kriteria dari apa yang dikemukakan Charles Tilly dalam konsep *reportar*. Adanya silaturahmi yang dilakukan dengan tujuan membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kebijakan merupakan bentuk dari poin pertama bahwasannya gerakan sosial merupakan gerakan yang terorganisir dengan baik. Disamping itu pada poin kelima dalam konsep Tilly adalah gerakan sosial membuat klaim secara publik atau terbuka yang mana konsep tersebut sejalan dengan temuan lapangan yang peneliti dapatkan bahwasannya Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya mengadakan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan serta mengajak seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk adaptasi yang dilakukan pasca dibubarkannya Front Pembela Islam.

## **B. Strategi FPI Pasca Pembubaran**

Dengan melihat realita lapangan yang terjadi di Kecamatan Kroya, Front Pembela Islam yang kini menjadi Front Persaudaraan Islam masih bertahan dan eksis. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pembahasan di atas mengenai adaptasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam pasca pembubaran. Disamping itu, penelitian ini juga meneliti bagaimana strategi yang dilakukan oleh FPI di Kecamatan Kroya pasca pembubaran yang mana terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh FPI yaitu; survival strategy, eksistensi di masyarakat, strategi kelembagaan, serta adanya strategi fundraising.

Sebagai sebuah gerakan, sebagaimana yang sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya yang mana peneliti menemukan bahwa FPI di Kecamatan Kroya melakukan beberapa strategi setelah dibubarkan dan strategi pertama yang dilakukan adalah survival strategy atau strategi bertahan. Strategi tersebut dibuktikan dengan dilakukannya deklarasi nama yang baru dari Front Pembela Islam yang berubah menjadi Front Persaudaraan Islam yang kemudian

disusul dengan perubahan-perubahan lainnya seperti visi dan misi, logo, hingga struktur. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan merupakan salah satu bentuk dari survival strategy atau strategi bertahan. Strategi kedua yang dilakukan oleh FPI Kecamatan Kroya yaitu dengan lebih fokus kepada terjalinnya ukhuwah serta lebih fokus kepada aspek humanity atau kemanusiaan serta meminimalisir adanya terjun lapangan untuk sweeping. Strategi tersebut dilakukan dalam rangka FPI tetap pada prinsipnya yang mana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta tetap eksis di lingkungan masyarakat.

Strategi lainnya yang dilakukan oleh FPI setelah adanya strategi bertahan dan strategi dalam eksistensi di masyarakat adalah strategi fundraising dan strategi kelembagaan. Kedua strategi tersebut saling berkaitan satu sama lain yang mana dalam strategi kelembagaan yang dilakukan FPI adalah dengan adanya lembaga pendidikan non-formal yaitu adanya pondok pesantren yang kemudian santri-santri tersebut turut serta dalam aspek fundraising atau pendanaan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh FPI seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

Berdasarkan temuan lapangan diatas terkait strategi yang dilakukan FPI di Kecamatan Kroya pasca pembubaran, dapat disimpulkan bahwa FPI di Kecamatan Kroya telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi pasca pembubaran. Dengan fokus pada *survival strategy*, kemudian eksistensi di masyarakat, adanya strategi kelembagaan dan strategi *fundraising* mampu membuat FPI terus bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Perubahan-perubahan yang dilakukan, penekanan pada ukhuwah serta aspek kemanusiaan, hingga adanya pondok pesantren merupakan bentuk nyata dari upaya FPI dalam memperkuat struktur, mempertahankan serta berkembang dan bertahan dari berbagai dinamika yang ada.

Dengan menggabungkan temuan lapangan tersebut dengan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Charles Tilly terkait dengan konsep *reportar*, dapat dipahami bahwa strategi yang dilakukan oleh FPI di Kecamatan Kroya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Charles Tilly tentang konsep reportar gerakan sosial. FPI di Kecamatan Kroya memiliki rasa solidaritas yang tinggi sehingga

mampu bertahan/*survive* serta berkembang dan mampu melanjutkan eksistensinya di masyarakat dengan menggunakan berbagai bentuk strategi yang relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan dan dinamika lingkungan.

### **C. FPI Kecamatan Kroya Pasca Pembubaran dalam Pandangan**

#### **Masyarakat**

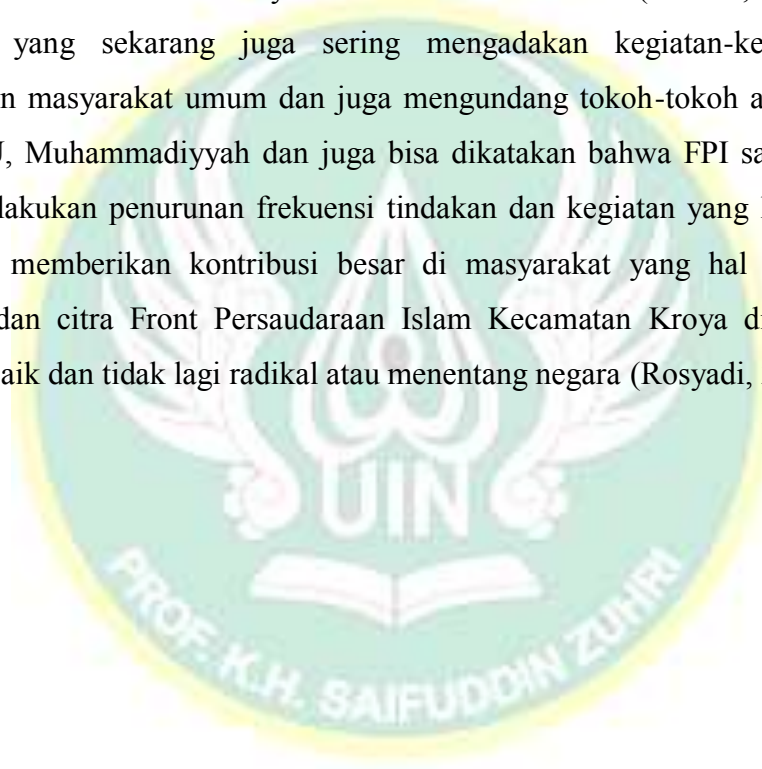
Pada beberapa tahun belakangan ini, Front Pembela Islam (FPI) telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi di Indonesia. Keputusan pemerintah untuk membubarkan organisasi ini pada tahun 2020 pun mendapat beragam respons dari Masyarakat, baik yang mendukung maupun menentang. Pasca pembubaran tersebut, muncul banyak spekulasi dan pertanyaan mengenai peran serta masa depan FPI, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI membawa dampak yang signifikan terhadap panorama politik dan sosial di Indonesia. Terlebih setelah adanya pembubaran resmi Front Pembela Islam yang kemudian disusul dengan adanya pendeklarasian perubahan nama menjadi Front Persaudaraan Islam.

Setelah pendeklarasian menjadi Front Persaudaraan Islam, pada bulan Maret 2022 dilaksanakannya Musyawarah Nasional guna membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gerakan seperti asas, lambang, visi misi, hingga paradigma dan program dari Front Persaudaraan Islam. Dari situ, terdapat perubahan dalam dinamika politik dan sosial. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pergeseran dalam strategi, adaptasi dan fokus FPI sebagai sebuah gerakan atau organisasi. Ketika masih Front Pembela Islam sering dikenal karena kegiatan dan tindakannya yang kontroversial seperti tindakan *sweeping*, samapi demonstrasi massa yang kerap kali memicu ketegangan dan konflik di Masyarakat. Namun pasca pembubaran dan menjadi Front Persaudaraan Islam, kini FPI mengalami transformasi yang signifikan yaitu dengan mengurangi serta membatasi tindakan *sweeping* atau penertiban kemudian memfokuskan pada aspek *humanity* atau kemanusiaan (Kholidin, 2024). Dengan tidak adanya lagi tindakan *sweeping* dan demonstrasi, serta penekanan yang lebih besar pada aspek kemanusiaan, FPI telah



menunjukkan komitmen yang jelas terhadap perubahan yang lebih positif dalam cara mereka beroperasi. Pandangan tersebut juga dilihat oleh masyarakat.

Banyak yang melihat langkah-langkah tersebut sebagai bukti nyata bahwasannya Front Persaudaraan Islam berbeda dengan Front Pembela Islam. Faktanya, sejak berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, hampir tidak pernah lagi membuat kontroversi atau terlibat dalam insiden yang memicu adanya ketegangan sosial. Sebaliknya, kini mereka turut aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat umum serta selalu berkontribusi membantu ketika di suatu wilayah/daerah terkena bencana (Ma'nah, 2024). Selain itu, FPI yang sekarang juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dan juga mengundang tokoh-tokoh agama seperti tokoh NU, Muhammadiyah dan juga bisa dikatakan bahwa FPI saat ini benar-benar melakukan penurunan frekuensi tindakan dan kegiatan yang kontroversial dan juga memberikan kontribusi besar di masyarakat yang hal ini merubah persepsi dan citra Front Persaudaraan Islam Kecamatan Kroya di masyarakat menjadi baik dan tidak lagi radikal atau menentang negara (Rosyadi, 2024).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan-paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya keberhasilan suatu gerakan atau organisasi dalam bertahan (*survive*) dan berkembang tidak bisa terlepas dari adanya strategi serta bentuk adaptasi yang diimplementasikan dalam sebuah gerakan. Dalam konteks penelitian mengenai adaptasi dan strategi FPI Kecamatan Kroya pasca pembubaran, ditemukan bahwa bentuk adaptasi dan strategi yang ada di lapangan telah teridentifikasi sesuai dengan konsep repertoar gerakan sosial dari Charles Tilly. Konsep repertoar gerakan sosial dalam pandangan Tilly yaitu serangkaian tindakan kolektif yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan terdapat 9 aspek yang dapat diacu sebagai gerakan sosial dalam konsep repertoar.

Berdasarkan temuan data dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh penulis, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh FPI pasca pembubaran adalah melakukan silaturahmi kepada *stakeholder* dan mengadakan berbagai kegiatan yang dapat merangkul seluruh elemen masyarakat. Bentuk adaptasi dengan melakukan silaturahmi kepada *stakeholder* merupakan salah satu mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh FPI sebagai langkah dasar dalam membangun kembali hubungan yang baik dengan para pemangku kebijakan. Disamping itu, bentuk adaptasi selanjutnya yang dilakukan oleh FPI Kecamatan Kroya pasca pembubaran adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan yang dapat merangkul seluruh elemen masyarakat. Adaptasi dengan cara seperti itu dilakukan oleh FPI dalam bentuk adanya kegiatan santunan anak yatim, sholawat, serta peringatan milad yang diadakan setiap tahun.

Selain adanya bentuk adaptasi yang dilakukan oleh FPI Kecamatan Kroya pasca pembubaran, terdapat strategi-strategi yang dilakukan oleh FPI. Strategi yang dilakukan pasca pembubaran oleh FPI yaitu ada strategi bertahan atau *survival strategy* yang mana dalam strategi ini terdapat pendeklarasian perubahan

nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam serta adanya perubahan-perubahan lain seperti visi-misi, dan lambang. Selain strategi tersebut, terdapat strategi lainnya yaitu eksistensi FPI di masyarakat yang mana dalam hal tersebut FPI dengan prinsipnya yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar saat ini lebih terfokus kepada terjalinnya ukhuwah dan mengurangi tindakan *sweeping* dengan fokus kepada aspek *humanity* atau kemanusiaan. Tidak hanya itu, strategi lainnya yaitu strategi kelembagaan yang mana FPI memiliki lembaga pendidikan non-formal berupa adanya Pondok Pesantren Darul Ishlah yang mana hal tersebut juga saling berkaitan dengan strategi *fundraising* atau pendanaan dari FPI.

Dari penjabaran bentuk adaptasi dan strategi yang dilakukan oleh FPI Kecamatan Kroya pasca pembubaran, berdasarkan analisa data dan temuan menunjukkan bahwa FPI Kecamatan Kroya adalah sebuah gerakan sosial yang mana memiliki beberapa aspek dilihat dari konsep repertoar dari Charless Tilly. Dengan dilakukannya silaturahmi dengan para stakeholder dan mengadakan berbagai kegiatan yang dapat merangkul seluruh elemen masyarakat adalah sebuah bentuk dari gerakan yang terorganisir serta adanya klaim publik. Serta adanya strategi-strategi yang dilakukan FPI Kecamatan Kroya pasca pembubaran juga sebuah bentuk bertahan/*survive* dan berkembang sehingga FPI bisa melanjutkan eksistensinya di masyarakat dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

## **B. Rekomendasi**

Penelitian tentang analisis perubahan FPI pasca pembubaran di Kecamatan Kroya pada tahun 2023 ini merupakan langkah awal yang perlu di lanjutkan dengan penelitian yang lebih lanjut. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian yang melibatkan survei opini publik atau masyarakat agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan persepsi masyarakat terhadap FPI pasca pembubaran. Disamping itu, penelitian yang menganalisis lebih mendalam tentang pengaruh media sosial terhadap citra dan reputasi FPI pasca pembubaran juga dapat menjadi subjek penelitian yang

menarik. Dengan melakukan penelitian lanjutan berdasarkan rekomendasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih detail tentang perubahan FPI pasca pembubaran dan implikasinya terhadap masyarakat serta kehidupan sosial-politik di Indonesia.

### **C. Saran**

Berdasarkan analisis temuan penelitian yang dilakukan, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi gerakan maupun peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Untuk FPI, alangkah lebih baiknya jika memiliki strategi khusus yang diatur dalam pengkaderan/perekrutan anggota agar gerakan tidak mandeg pada generasi yang ada pada saat ini saja.
2. Bagi peneliti selanjutnya, maka sangat diperlukan komunikasi yang intens dan sering dengan informan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. R. (2020). Penegakan amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Pelaksanaan Ritual Rokah Tase' di Kabupaten Pamekasan. *Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman Vol 6 No.2*.
- Abdul Qohar, K. M. (2017). Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran. *KALAM*.
- Abidin Nurdin, a. C. (2020). *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*. UNIMAL PRESS.
- Ahmad Basarah: *Perlu Gerakan Pembudayaan Pancasila*. (2016, Februari 16). Diambil kembali dari MPR: <https://www.mpr.go.id/berita/ahmad-basarah-perlu-gerakan-pembudayaan-pancasila>
- Alam Mahadika, V. R. (2022). Gerakan Filantropi di Masa Pandemi: Studi Netnografi Hilal Merah Indonesia Sayap Juang Front Persaudaraan Islam (FPI). *Brawijaya Journal of Social Science Vol. 1, No. 2*, 19.
- Ali Maksum, A. M. (2021). Transformasi Gerakan Islam PAsca Pelarangan Oleh Pemerintah Indonesia. *Universitas Brawijaya*, 13.
- Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam*. (2022). Banten.
- Annisa Nurdiassa, G. K. (2019). Eksistensi Organisasi Islam di Sulawesi Selatan: Studi Gerakan Sosial Politik Front Pembela Islam di Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik*, 2.
- Arianto, B. (2019). Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi atau Negara Islam. *Jurnal Communitarian Vol.2*, 153.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bagaskara, B. (2021). *Eks Anggota FPI Kuningan Deklarasikan Front Persatuan Islam*. . [news.detik.com](https://news.detik.com).
- Bayad, M. (2017). Gerakan Front Pembela Islam (FPI) di Pasuruan Tahun 2015-2017. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Bennett, J. W. (1996). *Human Ecology As Human Behavior*. London: Transaction Publishers.
- Berutu, S. A. (2021, Januari 5). *FPI Ganti Nama Lagi, Front Persatuan Islam jadi Front Persaudaraan Islam*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5321568/fpi-ganti-nama-lagi-front-persatuan-islam-jadi-front-persaudaraan-islam>

- Berutu, S. A. (2021, Januari 5). *FPI Ganti Nama Lagi, Front Persatuan Islam jadi Front Persaudaraan Islam*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5321568/fpi-ganti-nama-lagi-front-persatuan-islam-jadi-front-persaudaraan-islam>
- Bila. (2022, Maret 20). *Munas ke-1 Front Persaudaraan Islam (FPI) Sukses, Ini Struktur Pengurus DPP FPI*. Diambil kembali dari POSKOTA Lampung: <https://lampung.poskota.co.id/2022/03/20/munas-ke-1-front-persaudaraan-islam-fpi-sukses-ini-struktur-pengurus-dpp-fpi?halaman=1>
- Budiarti Utami Putri, S. P. (2021, Januari 3). *Front Persatuan Islam Tak Akan Didaftarkan ke Kemendagri*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1419533/front-persatuan-islam-tak-akan-didaftarkan-ke-kemendagri>
- Busairi. (2019). Eksistensi Gerakan Sosial Kegamaan Dewan Dakwah Provinsi Aceh. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh*, 23.
- Cegah Perpecahan, Ormas Islam Harus Miliki Ideologi yang Sama*. (2020, Januari 13). Diambil kembali dari Wapres RI: <https://www.wapresri.go.id/cegah-perpecahan-ormas-islam-harus-miliki-pemahaman-ideologi-yang-sama/>
- Cohen, B. J. (1983). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Dalimunte, M. (2018). Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 10.
- David Farkas, O. G. (2015). Ego-Resiliency Reloaded: A Three-Component Model of General Resiliency. *PLoS ONE*.
- Dr.Ali Maksum, A. M. (2021). Transformasi Gerakan Islam Pasca Pelarangan Oleh Pemerintah Indonesia. *Universitas Brawijaya*.
- E.Allen, D. (1980). *Social Psychology as Social Process*. Belmont: Wadworth Inc:California.
- Edith Grotberg, P. (1995). *A guide to promoting resiliency in children: Strengthening the human spirit*. Early Chidhood Development : Practice And Reflections.
- Efendi, A. (2016). Konsep Jihad Dalam Perspektif Front Pembela Islam. *Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 15.
- Fauzi, N. (2005). *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: INSIST Press.

- Ghozali, I. (2020). Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia: Muhammadiyah dan NU vs FPI dan HTI. *Jurnal Kajian Keislaman*, 41.
- H.Andrew Michener, J. D. (1999). *Social Psychology*. Fortworth: Hartcourt Brace College.
- Hakim, A. R. (2014). Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 5.
- Hamalik, O. (1993). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Mandar Manja.
- Harahap, D. M. (2020). Peran Front Pembela Islam (FPI) Dalam Penggerakan Dakwah di Kota Pekanbaru. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 23-24.
- Hardianto, F. (2020). Gerakan Sosial-Politik (Studi Kasus:Gerakan Sosial #2019GantiPresiden. *Universitas Negeri Semarang*, 10.
- Hidayat, D. (2012). *Komunikasi Antarpribadi dan Medianya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hilmy, M. (2011). Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Jurnal Islamica, Vol.6 No.1*, 11.
- Huda, S. (2020). Fpi: Potret Gerakan Islam Radikal. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 11.
- Husni, Y. (2010). Fundamentalisme Islam dalam Gerakan Front Pembela Islam. *Jurnal Studi Kepolisian*.
- Ihsanuddin, J. C. (2020, 12 31). *FPI Dibubarkan, Ketum dan Sekretaris Deklarasikan Front Persatuan Islam*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/31/06180051/fpi-dibubarkan-ketum-dan-sekretaris-deklarasikan-front-persatuan-islam>
- Indonesia, H. S. (2017, Oktober 30). *Kemendagri: Jumlah Ormas di Indonesia ada 344.039*. Diambil kembali dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/>
- Indonesia, P. D. (2022). *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*. 2022.
- Irfan Kamil, I. R. (2020, 12 30). *Dibubarkan Pemerintah, FPI: Kita Hadapi Enggak Perlu Tegang*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/19551811/dibubarkan-pemerintah-fpi-kita-hadapi-enggak-perlu-tegang>

- Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta : CV Absolute Media.
- Islam, F. P. (2022). *Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam*. Banten.
- Jabbar, H. A. (2022). Upaya Resiliensi dalam Gerakan NKRI Bersyariah Pasca Pembubaran FPI. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Jajang Jahroni, J. (2004). *Gerakan salafi radikal di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- John W. Reich, A. J. (2010). *Handbook of Adult Resilience*. New York: The Guilford Press.
- John, C. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jurdi, S. (2013). Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan. *Jurnal Politik Profetik*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. (2007). Jakarta: Balai Pustaka.
- Khoeron, M. (2022). *Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Kemenag.go.id.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kuppuswamy, B. (1979). *Elements of Social Psychology*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT Ltd.
- Lediya, S. O. (2022). Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Machfud, S. (2014). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Manese, R. M. (2023). Gerakan Islam Pasca Orde Baru: Kelahiran FPI dan Dampaknya. *Historia Islamica Journal of Islamic History and Civilization*.
- Masten, A. S. (2002). *Resilience in Development*. Dalam C. R. Snyder, & S. J. Lovez, *Handbook of Psychology*. New York: Oxford University Press.
- Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Jakarta : Resist Book.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Nashir, H. (2007). *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah.
- Ngatawi, A.-Z. (2006). *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Oliver, S. (2006, hlm. 2). *Strategi Public Relations*. Jakarta: Erlangga.
- Persada, S. (2021, Januari 3). *Front Persatuan Islam Tak akan Didaftarkan ke Kemendagri*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1419533/front-persatuan-islam-tak-akan-didaftarkan-ke-kemendagri>
- Pratama, A. B. (2019). GERAKAN SOSIAL POLITIK DPD FPI SUMATERA SELATAN. *UIN RADEN FATAH PALEMBANG*.
- Pusat, P. (2013). *Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Organisasi Masyarakat*. Jakarta: Indonesia.
- Rafifuddin, M. (2015). MENGENAL HIZBUT TAHRIR (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU). *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 29.
- Raharjo, M. I. (2020). Sejarah Perkembangan Front Pembela Islam Surabaya (2008-2020). *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 26.
- Reza Deni, T. F. (2021, Agustus 19). *Front Persaudaraan Islam Luncurkan Logo Baru pada HUT ke-76 RI*. Diambil kembali dari Tribunnews: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/19/front-persaudaraan-islam-luncurkan-logo-baru-pada-hut-ke-76-ri>
- Rosadi, A. (2008). *Hitam Putih FPI (Front Pembela Islam): Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*. Jakarta: Nun Publisher.
- Rosmala, G. (2021). Silaturahmi dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik). *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Sa'adah, M. (2020). Tindakan Sweeping Front Pembela Islam (FPI) di Paciran Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Sztompka . *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 33-34.
- Sani, M. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sepri Yunarman, N. F. (2022). GERAKAN SOSIAL EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN (Studi Kasus di Bengkulu). *Jurnal Sosiologi Nusantara*.

- Shobron, S. (2016). MODEL DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA. *Jurnal Studi Islam Profetika*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1-34.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sukses, Pelantikan Pengurus DPC FPI dan Sayap Juang Kabupaten Cilacap*. (2023, November 26). Diambil kembali dari Fakta Kini: <https://www.faktakini.info/2023/11/sukses-pelantikan-pengurus-dpc-fpi-dan.html>
- Sulaiman, A. (2014). Strategi Bertahan (Survival Strategy); Studi Tentang Agama Adat Orang Lom di Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Society, Vol II, No.1, 2*.
- Sulaiman, R. (2014). PEMIKIRAN DAN KIPRAH MAJELIS MUJAHIDIN . *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* .
- Suparman. (2009). Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol.II*.
- Syahrul Efendi, Y. P. (2006). *Habib-FPI gempur playboy ?!* Jakarta : Yudi Pramoko.
- Syawaludin, M. (2014). Perlawanan Petani Rengas terhadap PTPN VII di Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Sosiologi Reflektif, Vol.9 No.1*, 32.
- Syawaludin, M. (2014). Perlawanan Petani Rengas terhadap PTPN VII di Organ Ilir Sumatera Selatan. *Sosiologi Reflektif, Vol.9 No.1*, 44.
- Syihab, A.-H. M. (2008). *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah.
- Tarrow, S. (1998). *Social Movements and Contentious Politics* . Cambridge : Cambridge University Press.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

A. Nama : K.H.Kholidin  
Waktu : 1 Januari 2024  
Hasil

1. Bagaimana latar belakang berdirinya FPI di Kecamatan Kroya?

Jawab:

Jadi begini, yang melatarbelakangi berdirinya FPI di Kecamatan Kroya itu karena ingin menjalankan amar ma'ruf nahi munkar yang mana dengan melihat fakta dilingkungan Kecamatan Kroya banyak sekali kemaksiatan merajalela kayak misalnya judi, sabung ayam, tempat karaoke dan hiburan malam yang sering disalahgunakan tapi mereka tetap melenggang bebas karena adanya "oknum" aparat dibelakang mereka. Yang kemudian, di tahun 2003 resmi dibentuklah itu FPI di Kecamatan Kroya yang dulu dipelopori sama 4 orang yaitu saya, terus Pak Tugiyono, Hadi Sobirun, sama Akhmad Muntolib.

2. Sewaktu pemerintah secara resmi mengumumkan kalau FPI dibubarkan terus disusul oleh adanya deklarasi nama baru dari pengurus pusat FPI, apa saja yang berubah dari Front Pembela Islam ke Front Persaudaraan Islam di Kecamatan Kroya?

Jawab:

Sebenarnya setelah pendeklarasian tersebut, untuk di Kecamatan Kroya sendiri tidak banyak berubah secara struktural, akan tetapi tetap ada beberapa perubahan dengan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan apa yang disepakati secara bersama dari pengurus pusat dan imam besar Habib Rizieq diantaranya yang berubah ya itu kaya logo, terus visi dan misi.

3. Kalau untuk Front Persaudaraan Islamnya sendiri Kecamatan Kroya resminya kapan?

Jawab:

Setelah berganti jadi Front Persaudaraan Islam, kemudian dari pusat mengadakan Musyawarah Nasional di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 FPI Kecamatan Kroya mengikuti pelantikan akbar yang diadakan oleh DPD Provinsi. Pelantikan itu dilaksanakan tanggal 26 November 2023 untuk tempatnya kebetulan Kecamatan Kroya jadi tuan rumah diadakan di desa Gentasari. Pelantikan itu bukan cuma pelantikan pengurus saja Mbak, tapi juga pelantika lembaga-lembaga kayak sayap juang juga ikut dilantik.

4. Setelah adanya pembubaran, sebenarnya bagaimana respon dari para pengurus FPI?

Jawab:

Sebenarnya dengan pemerintah membubarkan FPI pada saat itu tidak malah membuat FPI bubar begitu saja, makanya dari pengurus pusat langsung mendeklarasikan nama baru yang tadinya Front Pembela Islam terus jadi Front Persaudaraan Islam dan itu komando dari Pusat dan Habib Rizieq. Rasa semangat para pengurus serta rasa solidaritas simpatisan dan aktivis dari FPI untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* itulah yang jadi landasan gerakan ini lahir dan bergerak kembali tanpa harus mendaftarkan organisasi atau gerakan Front Persaudaraan Islam ke Kemendagri.

5. Setelah menjadi Front Persaudaraan Islam, bentuk adaptasi apa saja yang dilakukan oleh FPI Kecamatan Kroya?

Jawab:

Bentuk adaptasi yang dilakukan di Kecamatan Kroya itu pertama kami silaturahmi dengan pemerintah setempat seperti pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa khususnya Desa Gentasari karena di desa tersebut Front Persaudaraan Islam menjadi ikon dari Kecamatan Kroya bahkan Kabupaten Cilacap. Dengan melakukan silaturahmi yang mana dengan maksud Front Persaudaraan Islam memperkenalkan diri kepada stakeholder bahwasannya FPI yang semula Front Pembela Islam kini menjadi Front Persaudaraan Islam dengan tatanan dan aturan yang baru dan masih eksis. Selain itu, tidak jarang juga intel atau pihak dari kepolisian sekitar mendatangi kami (Front Persaudaraan Islam) sehingga oleh kami ajak untuk berdialog dan saling sharing yang kemudian kami beritahukan bahwasannya FPI tetap ada dengan berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam dengan maksud kami mengenalkan bahwa FPI masih eksis.

6. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam Kecamatan Kroya pasca pembubaran Front Pembela Islam?

Jawab:

Pasca pembubaran strategi yang kami lakukan pertama tentu bagaimana kami bertahan dan strategi kami yaitu dengan tadi melakukan perubahan nama, dan lain sebagainya. Setelah itu kami masih dengan prinsip menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan lebih fokus kepada menjalin ukhuwah yang mana dengan melalui pendekatan Islamiyyah, ukhuwah wathoniyyah, dan juga ukhuwah bashoriyyah.

Untuk saat ini, kami (FPI) lebih sering dan lebih mengedepankan kepada terjun lapangan dalam bidang sosial misalnya ketika terjadi bencana alam serta hal-hal seperti bantuan sosial tanpa memandang bulu dan latar belakang. Tujuannya untuk kemanusiaan dan untuk mengembalikan kepercayaan ummat dan masyarakat. Kemudian juga dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kami lebih banyak via media sosial atau whatsapp grup daripada sweeping. Misalnya seperti jika kami menerima laporan dari warga terkait ada tindakan maksiat, kami teruskan laporan tersebut ke pihak yang berwajib kemudian kami menunggu respon dari pihak berwajib. Apabila ada instruksi, baru kami turun.

B. Nama : Tugiyono

Waktu : 26 Januari 2024

Hasil

1. Bagaimana struktur kepengurusan Front Persaudaraan Islam Kecamatan Kroya yang baru?

Jawab:

Pasca pembubaran dan pendeklarasian nama yang baru, kami (FPI di Kecamatan Kroya ) secara struktur kepengurusan baru punya pengurus inti saja yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun untuk simpatisan atau relawan ketika ada komando atau acara yang membutuhkan banyak orang pasti selalu ada saja simpatisan yang ikut serta berkontribusi meskipun bukan pengurus.

2. Apa saja yang dilakukan FPI Kecamatan Kroya pasca pembubaran dalam beradaptasi?

Jawab:

Yang dilakukan kami setelah dari pusat melakukan perubahan nama, kami melakukan silaturahmi dengan para pemangku kebijakan.

3. Strategi apa yang dilakukan oleh FPI Kecamatan Kroya pasca pembubaran?

Jawab:

Setelah pembubaran, sekarang kan namanya jadi Front Persaudaraan Islam bukan lagi Front Pembela Islam ya mbak, nah pasca berubahnya nama itu kami sampai saat ini lebih banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan.

C. Nama : K.Solihun

Waktu : 12 Februari 2024

Hasil

1. Kapan FPI di Kecamatan Kroya dilantik pertama kali sebelum berganti menjadi Front Persaudaraan Islam?

Jawab:

FPI Kecamatan Kroya pertama kali dilantik itu pada tahun 2016 yang mana pelantikannya itu pelantikan akbar yang diadakan dari DPW Kabupaten Cilacap dan Banyumas yang digabung dan yang dilantik seluruh FPI Kecamatan yang ada di Cilacap dan Banyumas. Yang melantik dari Dewan Pengurus Pusat.

2. Pasca pembubaran dan berubah jadi Front Persaudaraan Islam, bagaimana adaptasi yang dilakukan FPI Kecamatan Kroya?

Jawab:

Sejauh ini setelah jadi Front Persaudaraan Islam yang kami lakukan dalam beradaptasi ya kami memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat tanpa pandang apapun atau membeda-bedakan latar belakang. Kegiatan yang terakhir kami adakan itu ada haul dan milad. Acaranya diadakan beberapa hari dan banyak rangkaian seperti khitanan massal, santunan anak yatim, pengajian, terus juga sholawat, sama pengajian.

3. Kalau untuk strateginya setelah pembubaran apa yang dilakukan oleh FPI di Kecamatan Kroya?

Jawab:

Untuk strateginya setelah dibubarkan kami lebih cenderung turun ke lapangan dalam aksi kemanusiaan seperti kemarin-kemarin banyak yang terkena banjir, nah disitu kami terjun dan membantu masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat dan kami juga tetap eksis di masyarakat.

D. Nama : Dian Maftuhah

Waktu : 23 Februari 2024

Hasil

1. Berapa santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Ishlah?

Jawab: Total santri ada 25, yang 15 stay di pondok dan yang 10 santri kalong (anak-anak desa)

2. Untuk ngajinya kitab apa saja?

Jawab:

Kitab Tafsir Jalalain, kitab Safinnatun Najah, kitab Da'watutammah, kitab Nasoihul 'Ibad, dan Nahwu Shorof

3. Berapa uang yang harus dibayarkan para santri ke pondok tiap bulannya?

Jawab:

Sebenarnya dari Abah dan Ibu tidak membebaskan sama sekali ke santri alias gratis mba, tapi atas inisiatif para santri jadi tiap bulan hanya membayar 15.000/anak untuk iuran listrik saja

4. Kan PP Darul Ishlah ini dibawah naungan FPI ya mbak, nah apabila FPI ada kegiatan apakah para santri dimintai uang untuk membantu atau bagaimana?

Jawab:

Tidak mbak, dari santri tidak mengeluarkan uang sama sekali akan tetapi kami para santri dimintai untuk terjun langsung ke masyarakat serta ke para donatur yang sudah masuk dalam daftar. Hal ini dimaksudkan agar santri berinteraksi langsung dengan masyarakat.

E. Nama : Siti Ma'nah

Waktu : 20 April 2024

Hasil

1. Setelah FPI dibubarkan lalu berganti menjadi Front Persaudaraan Islam, apakah ada perubahan yang terlihat?

Jawab:

FPI yang sekarang bisa dikatakan berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kan sering turun ke lapangan buat nngrebeg tempat-tempat karaoke kalo sekarang sejauh ini sudah engga.

2. Kalau dari segi kegiatannya FPI yang sekarang gemana?

Jawab: Kegiatannya sih sejauh ini setelah pembubaran gaada yang mengganggu sama sekali, belum lama juga ada acara pondok sekaligus acara milad kalo ngga salah dan kegiatan itu mengundang masyarakat umum.

F. Nama : Imron Rosyadi

Waktu : 20 April 2024

Hasil

1. Setelah berganti menjadi Front Persaudaraan Islam, adakah perubahan yang terlihat?

Jawab: Sangat signifikan perubahan yang terlihat mbak. Dulu bisa dikatakan fanatik, sekarang lebih lemah lembut dan tidak pernah membuat kegaduhan atau apapun.

2. Untuk kegiatan yang dilakukan FPI apakah masih seperti dulu?

Jawab: Kegiatan yang saya tahu dan saya lihat sudah tidak seperti dulu kalau sekarang malah sering sekali kontribusi kalau ada bencana seperti bencana banjir yang berdampak di beberapa desa di Kecamatan Kroya belum lama ini.



**Lampiran II : Foto Wawancara & Kegiatan FPI Kecamatan Kroya**



Lampiran Gambar 1 Wawancara dengan Bapak K.H.Kholidin



Lampiran Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Tugiyono



Lampiran Gambar 3 Wawancara dengan Bapak K.Solihun



Lampiran Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Siti Ma'nah



Lampiran Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Imron Rosyadi



Lampiran Gambar 6 Kegiatan Milad FPI ke-3



Lampiran Gambar 7 Kegiatan Milad FPI ke-3




**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**SINTE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAI HADI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | www.bahasa.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 433424

**CERTIFICATE**  
 الشهادة  
 No.B-6455/Un.19/Kalab.FUAH/PP/08.2/2023

<p>This is to certify that</p> <p>Name : <b>Faradina Rahmawati Annisa Ananta</b></p> <p>Place and Date of Birth : <b>Cibacup, 15 September 2002</b></p> <p>Has taken : <b>101.A</b></p> <p>with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : <b>20 December 2023</b></p> <p>with obtained result as follows :</p> <p><b>Listening Comprehension: 48</b>      <b>Structure and Written Expression: 46</b>      <b>Reading Comprehension: 53</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obtained Score : 78</b></p> <p>The test was held in UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.</p>	<p>ممنحت إلى</p> <p>الاسم</p> <p>محل وتاريخ الميلاد</p> <p>وقد عاينت الاختبار على أساسي الكمبيوتر</p> <p>التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ</p> <p>مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:</p> <p>فهم المقروء</p> <p>المجموع الكلي</p> <p>تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كباي الحاج سيد الدين زهري الإسلامية الحكومية بـ</p> <p>Purwokerto, <b>20 December 2023</b></p> <p>The Head of Language Development Unit, رئيسة الوحدة لتنمية اللغة</p>
---	---



EPLS  
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri



UIN  
Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Muflihah, S.S., M.Pd.  
NIP.19720923 200003 2 001

# SERTIFIKAT

**No. B- /Un.19./Kalab.FUAH/PP.08.2/2/2023**




Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Tanggal 21 Februari 2023 Menerangkan Bahwa :

## Faradina Rahmawati Annisa Ananta

**NIM : 2017502042**

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Akademik 2022/2023 yang bertempat di :

**Peace Gen Bndung**

9 Januari - 7 Februari 2023

dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti Ujian Munaqosyah Skripsi.

**Purwokerto, 24 Februari 2023**



Mengetahui  
Dekan  
**Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.**  
NIP. 196309281990022001



Kepala Laboratorium  
**Sidiq Fauji, M.Hum.**  
NIP. 199201242018011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53128, Telp: 0281-435624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/19971/16/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : FARADINA RAHMAWATI ANNISA ANANTA  
**NIM** : 9020011465

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	73
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	71



Purwokerto, 16 Sept 2020



ValidationCode



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0404.K.LPPM/IKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **FARADINA RAHMAWATI ANNISA ANANTA**  
NIM : **2017502042**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **94 (A)**.



Certificate Validation





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.stb.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو
وحدة اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1886/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/X/2022

This is to certify that
Name : FARADINA RAHMAWATI A. A.
Place and Date of Birth : Cilacap, 15 September 2002
Has taken : EPTUS
with Computer Based Test, organized by
Technical Implementation Unit of Language on: 13 Oktober 2022
with obtained result as follows
Listening Comprehension: 53 Structure and Written Expression: 56 Reading Comprehension: 50
فهم المعجم فهم العبارات والتراكيب فهم المعقروء
المجموع الكلي: 530

The test was held in UIN Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيق الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو.

Purwokerto, 13 Oktober 2022



EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
IQLA
ikhtibarat al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabiyyah



The Head
رئيسة وحدة اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faradina Rahmawati Annisa Ananta
2. NIM : 2017502042
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 15 September 2002
4. Alamat Rumah : Jalan Batur Puri Mujur, RT.06 Rw. 04, Desa Mujur,  
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Joko Ananto
6. Nama Ibu : Sukinah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 01 Mujur (2014)
  - b. SMP Negeri 1 Kroya (2017)
  - c. MAN 3 Cilacap (2020)
  - d. UIN SAIZU Purwokerto (2020)

### C. Pengalaman Organisasi

1. PAC IPPNU Kec. Kroya (2018-2021)
2. HMJ SAA (2022/2023)
3. SAN (Senyum Anak Nusantara) (2023/2024)